



**RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**(RENJA PD)**  
**TAHUN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Siliwangi Nomor 355 – 357 Semarang 50146 Telepon 024-7604640, 7605660, 7605700

Faximile 024-7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>

Surat elektronik : [perhubungan@jatengprov.go.id](mailto:perhubungan@jatengprov.go.id)

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, *16 November* 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710914 199703 1 006

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja PD sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 272-273), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 (Pasal 11) tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu Tahun Anggaran sehingga memberikan gambaran mengenai Tujuan, Sasaran dan target kinerja OPD sesuai tupoksi. Secara fungsional Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 mendasarkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

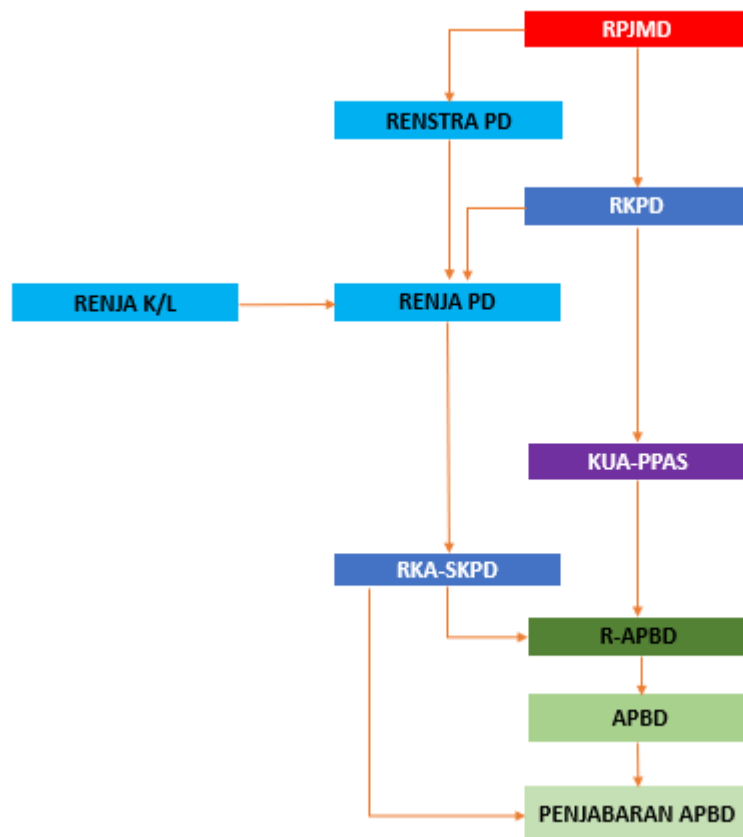
Tahapan penyusunan Renja PD meliputi : persiapan penyusunan Renja PD berupa koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur Tahun Anggaran 2024 pada Bulan Desember 2022, penyusunan Rancangan Awal Renja PD mendasarkan dengan SE Gubernur Jawa Tengah Nomor : 050.23/0000031 Tanggal 2 Januari 2023 tentang Arah Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan, Serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, penyusunan Rancangan Renja PD, pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD mendasarkan dengan SE Sekda Nomor : 050.23/0002965 Tanggal 17 Februari 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, perumusan Rancangan Akhir Renja PD, dan yang terakhir penetapan Renja PD.

Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 - 2026, Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 -2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah 2024, Renja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Setelah tahap perencanaan selesai dilanjutkan pada tahap penganggaran :

1. Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD;
2. Kepala Daerah Bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum APBD (KUA) selanjutnya Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Kepala Daerah;
3. Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD;
4. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan serta Renja PD terkait dengan target kinerja dan pagu indikatif;
5. Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya menyusun rencana Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, rencana peraturan tersebut akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD oleh Kepala Daerah.



Gambar I.1. Keterkaitan Renja Dengan Dokumen Perencanaan

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
15. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
16. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian;
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi;
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
33. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  34. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  35. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  37. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
  38. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
  39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  41. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang;
  42. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  43. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden sebagaimana telah diubah terakhir dengan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  44. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
  45. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
  46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
  47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;

48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
51. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2022 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
52. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
53. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 14 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
54. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
55. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
56. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 83 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Depo Peti Kemas;
57. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



59. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan;
60. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Wahana Tata Nugraha;
61. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
62. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek;
63. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
64. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
65. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Negeri Kebandarudaraan Nasional;
66. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan;
67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
69. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

71. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;
72. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
73. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
74. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
75. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KP.2128 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
76. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi nasional pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
77. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
78. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
79. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023;
80. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
81. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
82. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
83. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.22/57 Tahun 2016 Tentang Penetapan Terminal Penumpang Tipe B Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
84. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.34/07 Tahun 2021 tentang Penetapan Trayek Pelayanan Angkutan Dan Lintasan Penyeberangan Antar Kabupaten Dalam Provinsi Jawa Tengah;
85. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 622/11/Tahun 2022 tentang Penetapan Ruas dalam Jaringan Jalan Kolektor Primer-2 dan Jalan Kolektor Primer-3 sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Jawa Tengah;
86. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran / pagu indikatif pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah :

- a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2024 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022;
- b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 pada tahun ke-1 periode Tahun 2024.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
Menguraikan latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.
- BAB II : HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
Memuat Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 dan capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023; Analisa kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; Review terhadap rancangan RKPD Prov. Jateng Tahun 2024 dan Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH  
Memuat Telaahan terhadap kebijakan nasional; Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2024 dan perkiraan maju Tahun 2025 serta manajemen risiko program dan kegiatan tahun 2024
- BAB V : PENUTUP  
Berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN : Manajemen Resiko Perangkat Daerah

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2022

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2022 dan Capaian Renstra PD

Pagu Anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 170.418.443.000,- sedangkan prosentase penggunaan anggaran belanja di Tahun 2022 sebesar 98,28 % atau sebesar Rp. 167.478.841.939,- dengan realisasi fisik sebesar 100 %.

Dengan gambaran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan : Dari 33 indikator program tidak ada indikator program yang tidak memenuhi target. Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 88 indikator kegiatan sebanyak 1 indikator kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan yaitu Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip/tahun) tercapai 0 trip dari target 14 trip dengan tingkat capaian 0%.
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 33 indikator program sebanyak 15 indikator program yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu :
  - 1) Sebanyak 9 indikator program penunjang urusan pemerintah daerah yaitu Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dan Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (Kantor Dinas, BPSPP Wilayah I s.d VI dan Balai Transportasi Jawa Tengah) dengan tingkat capaian 100%;
  - 2) Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis, sampai dengan Tahun 2022 tercapai 28,57% dari target yang sudah ditetapkan 28,57% dengan tingkat capaian 100%;
  - 3) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 52,41 % dari target 52,41 % dengan tingkat capaian 100 %;
  - 4) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 42,77 % dari target 42,77 % dengan tingkat capaian 100 %;
  - 5) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 51,2 % dari target 51,2 % dengan tingkat capaian 100 %;

- 6) Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi tercapai 31,92 % dari target 31,92 % dengan tingkat capaian 100 %;
- 7) Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang tercapai 37,5 % dari target 37,5 % dengan tingkat capaian 100 %.

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 88 indikator kegiatan sebanyak 61 indikator kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Dari 33 Indikator program sebanyak 18 Indikator program yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu :

- 1) Sebanyak 9 indikator program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I s.d VI yaitu :

- a. Pembaharuan Izin AKDP yang berbadan hukum (3 Indikator) diantaranya Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 79,71% dari target 79,26% dengan tingkat capaian 100,57%; Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 66,43% dari target 66,12% dengan tingkat capaian 100,47% dan Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 83,92% dari target 83,77% dengan tingkat capaian 100,18%;

- b. Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (6 indikator) diantaranya Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A tercapai 28,13% dari target 21,88% dengan tingkat capaian 128,56%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B tercapai 40% dari target 35% dengan tingkat capaian 114,29%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A tercapai 50% dari target 43,75% dengan tingkat capaian 114,29%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A tercapai 23,08% dari target 19,23% dengan tingkat capaian 120,02%; Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B tercapai 61,54% dari target 53,85% dengan tingkat capaian 114,28% dan Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana

- Perhubungan Wilayah VI Kelas A tercapai 27,59% dari target 20,69% dengan tingkat capaian 133,35%;
- c. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang tercapai 30,03% dari target 25,68% dengan tingkat capaian 116,93%;
  - d. Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan tercapai 8,9% dari target 8,67% dengan tingkat capaian 102,65%;
  - e. Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM tercapai 5,49% dari target 5,29% dengan tingkat capaian 103,78%;
  - f. Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru tercapai 124,87% dari target 87,65% dengan tingkat capaian 142,46%;
  - g. Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan tercapai 28,13% dari target 23,19% dengan tingkat capaian 121,30%;
  - h. Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis tercapai 60% dari target 58,33% dengan tingkat capaian 102,86%;
  - i. Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin tercapai 49,25% dari target 49,25% dengan tingkat capaian 113,79%;
  - j. Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa tercapai 78,39% dari target 66,96% dengan tingkat capaian 117,07%;
  - k. Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api tercapai 17,88% dari target 15,73% dengan tingkat capaian 113,67%;

Sedangkan untuk indikator kegiatan dari 88 indikator kegiatan sebanyak 23 indikator kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan rincian pada Tabel 2.1.

- 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :
  - a. Penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya target kinerja indikator kegiatan Jumlah Trip Pelayanan KMC Kartini I Lintas Semarang-Karimunjawa (trip/tahun) dikarenakan KMC Kartini I Lintas Semarang dalam proses penghapusan (Fungsi keperintisan KMC kartini sudah berakhir dengan sudah banyaknya kapal komersial yang melayani lintas dari dan ke Karimun Jawa, selain itu kondisi KMC kartini yang sudah tua dengan kondisi fisik 58,76% (Hasil penilaian kondisi fisik tahun 2022).
  - b. Penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan dikarenakan koordinasi dengan K/L, OPD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kab/Kota dan *Stakeholders* terkait dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
  - c. Penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan:

- a) Dipengaruhi adanya peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD dan pembaharuan maupun perubahan izin perusahaan JPT angkutan laut dengan adanya Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin;
  - b) Adanya capaian lebih pengadaan dan pemasangan LPJU di Ruas Jalan Provinsi sebanyak 20 unit pada perubahan anggaran yang dipasang di Ruas Jalan Sidoharjo - Gabungan - Gemolong dan Bandungsari - Salem dan Pengadaan Warning Light sebanyak 2 Unit. Selain itu terdapat optimalisasi peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mendukung peningkatan keselamatan (termasuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan) pada Ruas Jalan Provinsi melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);
  - c) Adanya capaian lebih pada penanganan Daerah Rawan Kecelakaan Tahun 2022 dari target 6 lokasi tercapai 8 lokasi dikarenakan penambahan pemenuhan penanganan DRK di 2 lokasi pada perubahan anggaran yaitu DRK di Kendal (Simpang 3 Jl. Sumur Pitu) dan Penanganan DRK di Kab. Batang (Depan Pesantren Nurul Huda);
  - d) Terdapat Pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang masuk dalam perhitungan Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan;
  - e) Terapat capaian lebih pada fasilitasi infrastruktur strategis karena sudah dilakukan fasilitasi infrastruktur yaitu simpang Joglo Kota Surakarta dan Reaktivasi Jalur KA Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Mas (proses konstruksi).
  - f) Adanya bantuan teknis fasilitas perlengkapan jalan di perlintasan sebidang dari Balai Teknik Perkeretaapian Semarang.
  - g) Tidak ada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Angkutan Lebaran 2022 dan Angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yang melebihi target kinerja program/kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu faktor yang diharapkan dapat mempercepat peningkatan kelancaran distribusi barang dan jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.
  6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk indikator program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan perlu upaya percepatan pehapusan aset kapal KMC Kartini (saat ini proses penjajakan hibah KMC Kartini kepada instansi-instansi yang berminat).



Dengan diterbitkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Renja PD Tahun 2022 dan 2023 menggunakan nomenklatur Kepmendagri tersebut dengan mengacu hasil pemetaan program/kegiatan antara yang tertuang di dalam Renstra PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan program/kegiatan dalam Kepmendagri. Adapun persandingan program/kegiatan tersebut sebagai berikut :

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah		
		Tahun 2019 & 2020	Tahun 2021	Tahun 2022 & 2023
1	PERHUBUNGAN	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
		Pengembangan Perhubungan Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Pengelolaan Penerbangan	-
		Pengelolaan Perkeretaapian	Pengelolaan Perkeretaapian	
Pengembangan Perhubungan Laut	Pengelolaan Pelayaran	Pengelolaan Pelayaran		

Hasil rewiu dituangkan dalam tabel 2.1 berikut :



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wilayah II Kelas B)									
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
X	XX	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	Dokumen	13	14	14	100,00	13	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kinerja yang disusun								
X	XX	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Wilayah V Kelas B)									
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00	
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	0	-	-		0	0		
X	XX	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	100,00	12	100,00
X	XX	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
				Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	12	12	12	100,00	12	100,00
X	XX	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (Kantor Dinas	Laporan	12	12	12	100,00	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perhubungan)								
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah V Kelas B)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)								
X	XX	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	0	-	-		0	0	
X	XX	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
					Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Kantor Dinas Perhubungan)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah I Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah II Kelas B)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah III Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah IV Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wilayah V Kelas B)								
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (BPSPP Wilayah VI Kelas A)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Laporan	12	12	12	100,00	12	12	100,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
2	15	02	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	52,34	25,68	30,03	116,94	52,34	35,97	68,73

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	18,52	8,67	8,90	102,65	18,52	12,99	70,15
		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	5,68	5,29	5,49	103,78	5,68	5,68	100,00
		Persentase penumpang angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	%	94,45	87,65	124,87	142,46	94,45	193,38	204,74
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	42,86	28,57	28,57	100,00	42,86	42,86	100,00
		Persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan	%	43,75	23,19	28,13	121,30	43,75	43,75	100,00
		Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	100	58,33	60,00	102,86	100,00	100,00	100,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	31,25	21,88	28,13	128,56	31,25	37,50	120,00
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,51	52,41	52,41	100,00	52,51	52,51	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	50	35,00	40,00	114,29	50,00	55,00	110,00
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	43,21	42,77	42,77	100,00	43,21	43,21	100,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	62,5	43,75	50,00	114,29	62,50	68,75	110,00
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	52,03	51,20	51,20	100,00	52,03	52,03	100,00
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	38,46	19,23	23,08	120,02	38,46	42,31	110,00
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan	%	79,53	79,26	79,71	100,57	79,53	79,80	100,34

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wilayah IV Kelas A								
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	76,92	53,85	61,54	114,28	76,92	84,62	110,00
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	66,43	66,12	66,43	100,47	66,43	66,51	100,12
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	34,48	20,69	27,59	133,35	34,48	41,38	120,01
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	83,55	83,77	83,92	100,18	84,23	84,23	100,81
		Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	34,85	31,92	31,92	100,00	34,85	36,48	104,68
2	15	02	1.01	Penetapan Rencana						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Induk Jaringan LLAJ Provinsi											
		Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi Jawa Tengah	Dokumen	1	1	1	100,00	1	1,00	100,00		
2	15	02	1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi								
				Jumlah total perlengkapan jalan terpasang di Ruas Jalan Provinsi	Unit	2502	2.274	2.567	112,88	4252	3703	148,00
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Lokasi	10	8	9	112,50	10	12	120,00
				Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Km	8,75	8,25	8,25	100,00	10,25	10,75	122,86
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Lokasi	10	7	8	114,29	10	11	110,00
				Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapan jalannya Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Km	8,3	8,30	8,30	100,00	10,05	11,05	133,13
				Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Lokasi	10	7	8	114,29	10	11	110,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapannya Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Km	9,45	9,75	9,75	100,00	11,45	13,05	138,10
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Lokasi	10	5	6	120,00	10	11	110,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapannya Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Km	7,75	8,75	8,75	100,00	9,75	11,75	151,61
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Lokasi	10	7	8	114,29	10	11	110,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapannya Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Km	8,25	8,75	8,75	100,00	9,75	11,25	136,36
		Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Lokasi	10	7	8	114,29	10	12	120,00
		Panjang jalan yang dipertahankan kinerja perlengkapannya Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Km	8,5	9,50	9,50	100,00	10,25	12,25	144,12
		Jumlah shelter dalam kondisi baik yang siap operasional	Unit	210	165	165	100,00	210	210	100,00
2	15	02	1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	Orang	302	252	252	100,00	362	254	84,11
		Jumlah Kegiatan Audit dan Inspeksi pada Perusahaan Angkutan Umum	Kegiatan	12	12	12	100,00	12	12,00	100,00
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Unit	431235	86.247	86.430	100,21	34373	296457	68,75
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Unit	93485	18.697	18.790	100,50	5733	59966	64,15
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Unit	3773340	754.668	754.828	100,02	108405	2.301.710	61,00
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Unit	350120	70.024	70.232	100,30	24191	242.726	69,33
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Unit	873310	174.662	174.833	100,10	50074	564.578	64,65
		Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Unit	760125	152.025	152.300	100,18	39781	497.813	65,49
2	15	02	1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
		Jumlah penumpang angkutan umum yang terdata pada Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru	Orang	4189401	4.088.901	5.825.250	142,46	4406000	9044787	215,90
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Kegiatan	8	8	8	100,00	8	8	100,00
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Kegiatan	4	4	4	100,00	4	4	100,00
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Kegiatan	22	22	22	100,00	22	22	100,00
		Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Kegiatan	8	6	6	100,00	8	8	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Kegiatan	8	8	8	100,00	8	8	100,00
					Jumlah Pelaksanaan pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Kegiatan	10	10	10	100,00	10	10	100,00
					Jumlah bus Trans Jateng yang beroperasi di Kawasan Aglomerasi Perkotaan	Unit	112	98	98	100,00	107	112	100,00
2	15	02	1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah trayek angkutan aglomerasi perkotaan yang sudah dilayani	Trayek	5	4	4	100,00	5	5	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	1.12	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah perusahaan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang mengajukan perizinan	Unit	15	15	15	100,00	15	15	100,00
2	15	02	1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah penerbitan dokumen perizinan trayek AKDP Sesuai SPM	Dokumen	366	324	354	109,26	366	366	100,00
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah I Kelas A	Dokumen	502	497	511	102,82	512	512	101,99

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah II Kelas B	Dokumen	286	280	293	104,64	296	296	103,50
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah III Kelas A	Dokumen	550	541	555	102,59	564	564	102,55
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah IV Kelas A	Dokumen	873	869	880	101,27	878	880	100,80
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah V Kelas B	Dokumen	839	833	845	101,44	845	845	100,72
					Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum Di BPSPP Wilayah VI Kelas A	Dokumen	1102	1.096	1.112	101,46	1107	1116	101,27
2	15	02	1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah perusahaan AJDP yang di monitoring dan evaluasi	Unit	15	15	15	100,00	15	15,00	100,00

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
								Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	15	02	1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah trayek angkutan perintis yang terlayani (trayek)	Trayek	4	-	-		4	4	100,00
2	15	02	1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
					Jumlah perusahaan yang dievaluasi tarif dan load factor (Perusahaan)	Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	15	03		PENGELOLAAN PELAYARAN									
					Persentase fasilitas keselamatan pelayaran	%	75	37,50	37,50	100,00	75	75	100,00







Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023		
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra PD (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										
		Jumlah Dermaga Sungai yang sesuai standar berdasarkan tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan (Lokasi)	Lokasi	6	3	3	100,00	6	6	100,00	
2	15	05		PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN							
				Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	45,45	15,73	17,88	113,67	45,45	100,00
2	15	05	1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian							
				Jumlah perlintasan KA yang dilengkapi prasarana penunjang sesuai tingkat pemenuhan per jenis Fasilitas keselamatan (Lokasi)	Lokasi	10	3,93	3,93	100,00	10,00	100,00
				Jumlah Peraturan Gubernur Terkait Penetapan Rencana Induk Jaringan Perkeretaapian Provinsi Jawa Tengah (Dokumen)	Dokumen	-	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Keterangan :

1. Kolom (2), (3), dan (4) diisi dengan program, kegiatan beserta indikator kinerja dan satuannya sesuai dengan Renja PD Tahun 2022 (Perubahan)

2. *Kolom (5) diisi target kinerja akhir program dan kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah (yang telah disesuaikan)*
3. *Kolom (6) diisi target kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2022 (Perubahan);*
4. *Kolom (7) diisi dengan realisasi kinerja program dan kegiatan sesuai Renja PD Tahun 2022;*

Dari rincian Tabel 2.1 tingkat capaian perkiraan realisasi indikator program Tahun 2023 terhadap target akhir Renstra PD Tahun 2018-2023 (murni) dapat diketahui bahwa proyeksi capaian indikator program yang tidak tercapai diantaranya :

1. Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang perkiraan tercapai 35,97% dari target 52,34% dengan tingkat capaian 68,73%;
2. Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan tercapai 12,99% dari target 18,52% dengan tingkat capaian 70,15%;

Indikator-indikator tersebut di atas disebabkan karena adanya realokasi anggaran pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan di Ruas Jalan Provinsi untuk penanganan dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 serta adanya kebijakan Pemerintah Pusat yaitu penundaan kegiatan Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor Tahun 2020 dan 2021.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2022 kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan Memantapkan Sistem Transportasi Yang Berorientasi Pada Konektivitas Antar Kawasan Pengembangan Di Provinsi Jawa Tengah dengan indikator Persentase pelayanan Transportasi antar Kawasan pengembangan di Provinsi Jawa tengah sebesar 43,61% dari target 39,38% sehingga tingkat capainnya 110,74%. Berikut rincian capaian masing – masing sasaran :

1. Meningkatnya layanan jaringan distribusi transportasi dengan indikator Persentase layanan jaringan distribusi transportasi sebesar 54,98% dari target 47,74% sehingga tingkat capainnya 115,17%;
2. Meningkatnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dengan indikator Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi sebesar 29,19% dari target 23,73% sehingga tingkat capainnya 123,01%;
3. Meningkatnya kualitas angkutan umum aglomerasi dengan indikator Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal sebesar 46,67% dari target 46,67% sehingga tingkat capainnya 100,00%.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah pada level program dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi 2023	Catatan analisis
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
1	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
2	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Kantor Dinas Perhubungan			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
3	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah I Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
4	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah II Kelas B			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
5	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah III Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
6	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah IV Kelas A			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
7	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP Wilayah V Kelas B			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
8	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-BPSPP			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi 2023	Catatan analisis
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
	Wilayah VI Kelas A							dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
9	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah-Balai Transportasi Jawa Tengah			100,00	100,00	100,00	100,00	Indikator seragam seluruh OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Indikator masih digunakan dalam perencanaan Tahun 2022-2023)
10	Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang			42,85	52,34	30,03	35,97	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Tidak</b> Tercapai Karena masih terdapat kebutuhan Anggaran
11	Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan			14,63	18,52	8,90	12,99	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Tidak</b> Tercapai karena selama Tahun 2020 s.d 2021 kegiatan ditiadakan sesuai dengan Surat dari Pemerintah Pusat
12	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			25,00	31,25	28,13	37,50	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
13	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			40,00	50	40,00	55,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
14	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			50,00	62,50	50,00	68,75	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
15	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			30,77	38,46	23,08	42,31	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi 2023	Catatan analisis
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
16	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			61,54	76,92	61,54	84,62	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
17	Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			27,59	34,48	27,59	41,38	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
18	Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM			5,49	5,68	5,49	5,68	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
19	Persentase Penumpang Angkutan Umum Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru			90,14	94,45	124,87	193,38	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena Tidak ada Pembatasan Kegiatan Masyarakat, terdapat fasilitasi mudik gratis (Pemerintah Pusat dan Daerah serta Swasta) dan Fasilitasi pergerakan melalui Rekyasa Lalu Lintas <i>One Way</i>
20	Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis			38,10	42,86	28,57	42,86	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
21	Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan			37,50	43,75	28,13	43,75	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
22	Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis			80,00	100	60,00	100,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
23	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A			52,00	52,51	52,41	52,51	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi 2023	Catatan analisis
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
24	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B			42,34	43,21	42,77	43,21	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
25	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A			51,20	52,03	51,20	52,03	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
26	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A			79,17	79,53	79,71	79,80	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD
27	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B			65,96	66,43	66,43	66,51	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD
28	Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			83,09	83,55	83,92	84,23	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena peningkatan kesadaran dan animo masyarakat dalam legalisasi badan hukum perusahaan bus AKPD
29	Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi			33,55	34,85	31,92	36,48	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena terdapat penambahan 3 armada Koridor Semarang-Bawen Tahun 2020 (Load Faktor 97%)
30	Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang			62,50	75	37,50	75,00	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD		Realisasi Capaian Tahun 2022	Proyeksi 2023	Catatan analisis
				2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(9)	(10)	(12)
31	Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin			41,42	43,28	49,25	51,12	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 <b>Melebihi</b> Target Renstra Murni karena adanya Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), pengusaha dengan mudah mengajukan permohonan izin
32	Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa			78,39	87,79	78,39	87,79	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai
33	Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api			36,36	45,45	17,88	45,45	Proyeksi Realisasi Tahun 2023 Target Renstra Murni <b>Dapat</b> Tercapai

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Keterangan :

- Kolom (2) diisi indikator program;
- Kolom (5) dan (6) diisi target kinerja program sesuai dengan Renstra PD (yang telah disesuaikan)
- Kolom (7) diisi realisasi kinerja program tahun 2022;
- Kolom (8) diisi perkiraan capaian kinerja program tahun 2023;
- Kolom (9) diisi catatan analisis dari kinerja indikator program tersebut.



### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Perhubungan yang memiliki peran penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan di segala sektor yang diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan :

- a) Perumusan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- b) Pelaksanaan kebijakan Bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- c) Pelaksanaan dan evaluasi pelopran Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian, dan Pelayaran.
- d) Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

1. Dinas Perhubungan memiliki peran strategis dalam menunjang Pusat Kegiatan Nasional / Pintu Gerbang Nasional dimana sebagai pendukung perekonomian pulau Jawa Bagian Utara dan Selatan ditunjang dengan adanya Jalan arteri Primer, Kereta Api, Bandara dan Pelabuhan. Serta pendukung pergerakan orang atau barang di 3 (tiga) wilayah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta 3 (tiga) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di sektor pertanian, industri dan pariwisata.

Sesuai dengan proyeksi capaian kinerja indikator program TA. 2023 terhadap target akhir Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (murni), terdapat 2 indikator yang diproyeksi tidak tercapai yaitu Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; dan Persentase jumlah Abdi Yasa dan Pelajar Pelopor yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan.

Koordinasi dan sinergitas program antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Kementerian dan Lembaga di Tingkat Pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

- a. Koordinasi dan sinergitas program antar Perangkat Daerah Provinsi diantaranya :

- 1) Optimalisasi peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dalam mendukung peningkatan keselamatan pada Ruas Jalan Provinsi;
  - 2) Sinkronisasi dan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan pelajar pelopor;
  - 3) Koordinasi dengan Dinas PU SDA Taru terkait rencana penanganan dermaga sungai dan pembangunan jembatan penghubung Stasiun Kutoarjo dan Terminal Kutoarjo;
  - 4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
  - 5) Koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam perizinan Jasa Pengurusan Transportasi di Bidang Pelayaran;
  - 6) Koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD, BAPPEDA, Biro Perekonomian, Biro Organisasi) dalam rencana penerapan PPK BLUD dalam pengelolaan Trans Jateng.
- b. Koordinasi dan sinergitas program dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di antaranya :
- 1) Peningkatan layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) sebagai dukungan pada sektor Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pariwisata, Perindustrian, dan Perdagangan melalui re-routing/integrasi trayek angkutan perkotaan dan/atau pedesaan sebagai upaya integrasi rencana pengembangan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan;
  - 2) Peningkatan simpul transportasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Terminal Tipe C);
  - 3) Penanganan daerah rawan kecelakaan.
- c. Koordinasi dan sinergitas program dengan Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat
- Koordinasi yang dilakukan yaitu mensinkronkan kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah guna mendukung Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan *Major Project* pada RPJMN 2020-2024 sektor transportasi antara lain berupa :

- 1) Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penanganan infrastruktur kewenangan pusat diantaranya Reaktivasi Jalur Kereta Api Non Aktif dan penyelesaian proses P3D Pelabuhan Pengumpang Regional;
- 2) Rapat-rapat koordinasi dan FGD untuk mendorong program/kegiatan dalam Perpres 79 Tahun 2019;
- 3) Koordinasi dengan Kementerian Dalam negeri terkait penyelesaian proses P3D Pelabuhan Pengumpangan Regional dan rencana PPK BLUD dalam pengelolaan Trans Jateng;
- 4) Fasilitasi pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Semarang Berbasis Jalan;
- 5) Fasilitasi pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan Pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang;
- 6) Peningkatan simpul integrasi Trans Jateng di Terminal Tipe A;
- 7) Fasilitasi pengembangan dan/atau pembangunan Pelabuhan Pendukung Kawasan Industri Terpadu (KIT) di Kabupaten Batang;
- 8) Fasilitasi angkutan berbasis jalan dan rel sebagai pendukung aksesibilitas KEK Kendal.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Bidang Lalu Lintas Jalan

- 1) Masih rendahnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan;
- 2) Masih kurangnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah;

Hambatan :

- 1) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas belum optimal;
- 2) Masih perlunya rekomendasi hasil Forum LLAJ;
- 3) Masih perlunya rekomendasi/persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi;
- 4) Masih banyaknya kebutuhan perlengkapan jalan;
- 5) Masih kurangnya Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah;
- 6) Masih diperlukannya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan

Umum (Kendaraan karoseri yang sesuai uji tipe yang ditetapkan);

7) Masih rendahnya Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi (sopir dan pelajar);

b. Bidang Angkutan Jalan

1) Masih kurangnya konektivitas angkutan jalan.

2) Penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum masih rendah.

Hambatan :

1) Masih kurangnya pemenuhan angkutan taksi;

2) Masih rendahnya angkutan barang berijin;

3) Masih kurangnya pemenuhan Angkutan Orang Dalam Trayek;

4) Pengendalian dan pengawasan Tarif dan Load Factor kelas ekonomi belum optimal;

5) Belum ada Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi;

6) Belum semua Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;

7) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan sesuai kewenangan belum optimal;

8) Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Kewenangan Provinsi Belum optimal.

9) Penumpang angkutan umum yang terlayani pada periode arus lalu lintas tinggi masih rendah;

10) Pengawasan penyediaan Angkutan pada periode arus lalu lintas tinggi belum optimal.

c. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

1) Belum optimalnya Pemanfaatan Terminal;

2) Masih kurangnya implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis;

3) Belum semua perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar.

Hambatan :

1) Tidak semua terminal Tipe B dalam kondisi baik;

2) Tidak semua Terminal Tipe B mempunyai Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B;

3) Pembangunan Gedung Terminal belum menyeluruh;

4) Masih diperlukannya Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;

5) Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;

6) Masih kurangnya Implementasi Dokumen RIJLLAJ;

- 7) Masih diperlukannya pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
- 8) Terdapat kabupaten yang hanya memiliki terminal tipe C.
- 9) Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi belum direview dan ditetapkan;
- 10) Masih banyaknya perlintasan sebidang Kereta Api yang pemasangan fasilitas keselamatan belum sesuai standar.

d. Bidang Pelayaran

- 1) Belum optimalnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP;
- 2) Masih rendahnya Jumlah lintas Penyeberangan Sungai yang terpenuhi fasilitas keselamatan.

Hambatan :

- 1) Belum semua trayek ASDP melengkapi dokumen sebagai persyaratan ijin trayek ASDP berdasarkan tingkatannya;
- 2) Belum terpenuhinya Fasilitas Pelabuhan SDP ;
- 3) Masih rendahnya perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin;
- 4) Masih rendahnya *Berth Occupancy Ratio*;
- 5) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Transportasi Laut dan ASDP belum optimal;
- 6) Proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum selesai;
- 7) Kurangnya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia.

e. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah Sejateng

- 1) Masih rendahnya rekomendasi *ramp check* yang ditindak lanjuti;
- 2) DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani belum optimal menurunkan kecelakaan.
- 3) Masih rendahnya keterisian Bus.

Hambatan :

- 1) Masih rendahnya Jumlah Kendaraan yang dilakukan *ramp check*;
- 2) Masih diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan (WASTIB) untuk meningkatkan jumlah perusahaan angkutan umum yang menerapkan manajemen keselamatan (kelengkapan administrasi dan kelaikan jalan) terhadap kendaraan yang dimiliki.
- 3) Kurangnya rehabilitasi DRK;
- 4) Masih perlunya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi.

- 5) Belum semua Terminal Penumpang Tipe B asetnya sepenuhnya milik Pemerintah Provinsi;
- 6) Kurangnya pemeliharaan terminal Tipe B

f. Balai Transportasi Jawa Tengah

- 1) Perpindahan moda angkutan umum belum optimal;
- 2) Belum optimalnya Konektivitas Perkotaan.

Hambatan :

- 1) Penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan belum optimal;
- 2) Masih diperlukannya penyediaan bus Trans Jateng;
- 3) Kurangnya Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB).

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

- a. Sasaran pembangunan daerah Meningkatkan perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan tercapai;
- b. Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagai program unggulan daerah tahun 2024 yaitu Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan terwujud,

c. Program kegiatan yang ada dalam mendukung SDGs :

- 1) Goal 9 : “Membangun insfratraktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi dengan target mengembangkan insfratsruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk insfratraktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembanungan ekonomi dan pengembangan wilayah terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
a)	Panjang jalur kereta api di Jawa Tengah	1034,030 Km	1053,765 Km
b)	Jumlah pelabuhan strategis di Jawa Tengah	PM	14 Pelabuhan

- a) Sampai dengan Tahun 2022 terealisasi 1.053,765 km/sp terdiri dari 878,155 km/sp jalur eksisting dan 175,61 km/sp jalur rencana yang teralisasi (Jalur ganda lintas selatan Purwokerto-Kutoarjo 103 km/sp, Solo-Kedungbanteng 44 km/sp, KA Bandara Adi Sumarmo 13,5 km/sp, Semarang-Demak-Rembang 0 km/sp, Purwokerto-Wonosobo 0 km/sp, Kedungjati-Tuntang-ambarawa-Magelang 5,11 km/sp, Rendegan-Sikampung 10 km/sp dan KSPN Borobudur 0 km/sp);

- b) Jumlah Pelabuhan strategis di Provinsi Jawa Tengah 11 pelabuhan : Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang (pelabuhan utama), Pelabuhan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Tegal (pelabuhan pengumpul), Pelabuhan Batang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Kendal (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Jepara (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Karimun Jawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Legon Bajak di Karimunjawa (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Juwana (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Tasik Agung di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional), Pelabuhan Sluke di Kabupaten Rembang (pelabuhan pengumpan regional, dan 3 Pelabuhan Pengumpan Lokal yaitu : Pelabuhan Brebes, Pelabuhan Pemalang serta Pelabuhan Pekalongan.
- 2) Goal 11 : “Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif aman tangguh dan berkelanjutan terwujud dengan indikator :

No	Indikator SDGs Provinsi	Tahun 2022	
		Target	Realisasi
a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	PM	13,7%

- a) Persentase pengguna moda transportasi pada Tahun 2022 di Kota Magelang 6,73%, Kota Surakarta 2,39%, Kota Salatiga 0,71%, Kota Semarang 0,36%, Kota Pekalongan 2,73% dan Kota Tegal 1,52%;
- b) Sedangkan Persentase pengguna Angkutan Umum Trans Jateng di Wilayah Pengembangan Kedungsepur 1,7%, Barlingmascakeb 0,6%, Subosukawonosraten 0,5% dan Purwomanggung 0,5%.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
- a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
- 1) Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor;
  - 2) Rendahnya disiplin dan pengetahuan masyarakat dalam keselamatan transportasi;
  - 3) Tuntutan kualitas, kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi;
  - 4) Terminal belum optimal untuk mengakomodir UMKM;

- 5) Koordinasi dengan pihak lain (Kementerian, POLRI, BUMN) belum optimal;
  - b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah :
    - 1) Adanya pengembangan kawasan aglomerasi, penetapan kawasan pariwisata nasional dan kawasan industri.
    - 2) Rencana pengembangan infrastruktur strategis kewenangan pusat di Jawa Tengah (Pengembangan bandara, kereta api, pelabuhan dan pembangunan Terminal) yang tertuang dalam Perpres 79/2019 serta Perpres 109/2020;
    - 3) Tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan angkutan umum yang handal, nyaman, aman dan terjangkau;
    - 4) Adanya layanan transportasi massal perkotaan yang dapat digunakan sebagai *Feeder*.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Strategis	Isu penting yang perlu ditindaklanjuti	Implementasi Riil
Konektivitas antar wilayah pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan jaringan trayek angkutan jalan;</li> <li>b. Peningkatan Konektivitas Perkotaan;</li> <li>c. Peningkatan implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis;</li> <li>d. Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi perizinan dan perumusan kebijakan (angkutan aglomerasi perkotaan WP Petanglong dan angkutan pedesaan) serta sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang/barang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;</li> <li>b. Perluasan cakupan wilayah angkutan aglomerasi perkotaan dengan pemenuhan shelter pada wilayah pengembangan Purwomanggung dan Subosukawonosraten) sebanyak 6 Unit Shelter;</li> <li>c. Fasilitasi Implementasi hasil rencana induk LLAJ Provinsi utamanya terminal</li> </ol>



		<p>tipe B (Wilayah Jawa Tengah Bagian Timur) dan Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi serta infrastruktur strategis lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Reaktivasi jalur keretaapi dan pengoptimalan bandara di jawa tengah;</p> <p>d. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi serta fasilitasi perizinan usaha angkutan laut dan pelabuhan regional.</p>
Simpul Transportasi	<p>Peningkatan pemanfaatan terminal tipe B dan keterisian bus di terminal tipe B melalui pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terminal tipe B untuk mendukung Kawasan strategis utamanya pada PKN dan PKW promosi, konektivitas Jalur Tengah Jawa Tengah serta mendukung operasional trans jateng;</p>	<p>a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap IV</p> <p>b. Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purwodadi Kab. Purwodadi;</p> <p>c. Pemeliharaan di 6 (enam) terminal tipe B Jawa Tengah yaitu terminal Penumpang Tipe B Pengaron Kota Semarang, Gagak rimang Kab. Blora, Tawangmangu Kab.Karanganyar, Madureso Kab. Temanggung, Purbalingga Kab. Purbalingga dan Kajen Kab. Pekalongan.</p>
Optimalisasi Ruang pergerakan	<p>Meningkatkan Perpindahan moda ke angkutan umum</p>	<p>Penyediaan angkutan massal aglomerasi perkotaan (lanjutan operasional trans jateng pada wilayah pengembangan Kedungsepur, Barlingmascakeb,</p>

		Purwomanggung dan Subosukawonosraten) sebanyak 7 koridor dengan 115 bus.
Peningkatan Keselamatan Transportasi	<p>a. Meningkatkan ruas jalan yang dilengkapi dengan kebutuhan minimal perlengkapan jalan utamanya mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata.</p> <p>b. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan serta pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Provinsi;</p> <p>c. Meningkatkan kendaraan laik jalan di Jawa Tengah;</p> <p>d. Pemenuhan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA pada Ruas Jalan Provinsi;</p>	<p>a. Pengadaan dan pemasangan LPJU di ruas jalan provinsi sebanyak 46 unit pada ruas jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro 39 Unit dan Jl. Lasem - Sale / Bts. Prov Jawa Timur 7 Unit.</p> <p>b. Penanganan 12 lokasi DRK yang tersebar di 6 BPSPP wilayah.</p> <p>c. Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, Pelaksanaan Ramp Check serta peningkatan pemahaman keselamatan kepada pengemudi angkutan umum dan pelajar.</p> <p>d. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang pada 3 perlintasan sebidang di JPL 446 Kab. Cilacap; JPL 610 Kab. Purworejo dan JPL 146 Kab. Sragen</p>

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

#### 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Reviu dilakukan dengan melakukan proses-proses sebagai berikut:

1. Identifikasi program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD.

Proses ini dilakukan agar program dan/atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dapat teridentifikasi. Program dan kegiatan prioritas diidentifikasi dan diarahkan sebagai upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Hasil Identifikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasional 7 koridor lama (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumber Lawang Via Sangiran; Semarang-Gubug dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri); peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 4 terminal, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap IV serta Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Sukoharjo Kab. Sukoharjo, Purwodadi Kab. Purwodadi dan Banjarnegara Kab. Banjarnegara; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di utamanya mendukung konektifitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan, jalur evakuasi bencana serta penghubungan Pansela dan Jalur tengah Jawa Tengah sebanyak 1.447 unit pada ruas jalan Ngadirojo - Biting / Bts. Prov. Jatim; Purwantoro - Nawangan / Bts. Prov. Jatim; Wanayasa - Batur; Magelang - Kaliangkrik / Bts. Kab. Wonosobo; Prembun - Wadaslintang / Bts Kab. Wonosobo; Wadaslintang - Selokromo; Gombang - Sempor - Ketileng / Bts Kab. Banjarnegara; Mandiraja - Ketileng / Bts Kab. Kebumen; Dan Bruno / Bts Kab. Purworejo - Kepil; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga Sungai Kalikutho lintas Batang - Kendal Tahap II sebanyak 3 (tiga) Dermaga (lintas penyeberangan Lutungmati - Tegalsari dan Yosorejo - Jatipurwo); kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan

peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di perlintasan sebidang pada 5 perlintasan sebidang di Kab. Cilacap (JPL 2, JPL 464, JPL 441, JPL 26) dan Kab. Purworejo (JPL 610) (pemasangan sesuai dengan Pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api) serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif.

2. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan :

Pada rancangan awal RKPD terdapat 4 Program dan 27 Kegiatan dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan menurut daftar skala prioritas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah . Perbandingan diantaranya:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya, kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasional 7 koridor lama (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumber Lawang Via Sangiran; Semarang-Gubug dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri) dengan 115 unit Bus (terdapat penambahan 1 Unit Bus di Koridor Solo-Sukoharjo-Wonogiri dan 2 Bus di Koridor Semarang-Kendal) ; Kegiatan peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 2 terminal, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap IV serta Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purwodadi Kab. Grobogan (perubahan jumlah dan lokasi peningkatan terminal sesuai dengan prioritas kebutuhan); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan

pemasangan LPJU di utamanya mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata sebanyak 46 unit pada ruas jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro 39 Unit dan Jl. Lasem - Sale / Bts. Prov Jawa Timur 7 Unit; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

b. Pengelolaan Pelayaran

Rumusan kegiatan prioritas yang sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi utamanya berupa Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Pengelolaan Perkeretaapian

Rumusan kegiatan prioritas sudah sesuai dengan kebutuhan namun terdapat penyesuaian anggaran diantaranya pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di perlintasan sebidang dari 5 perlintasan menjadi 3 perlintasan sebidang. Lokasi pemasangan adalah sebagai berikut JPL 446 Kab. Cilacap; JPL 610 Kab. Purworejo dan JPL 146 Kab. Sragen (pemasangan sesuai dengan Pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api) serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif.

Tabel 2.4  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				84.698.222	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				63.544.745	
		Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	100	81.939.972		Kota Semarang,Pati, Surakarta, Kota Magelang, Banyumas, Kota Pekalongan, Grobogan, Blora, Demak, Batang, Pekalongan, Temanggung, Kab.Magelang, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Purworejo, Sukoharjo, Banjarnegara, Purbalingga, Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) **	100	61.996.893	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; - Penundaan/penyesuaian pemeliharaan gedung kantor dan Penysuaian Gaji dan Tunjangan - Penundaan pengadaan kendaraan operasional (Crane)
		Kota Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	400.000		Kota Semarang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	100	346.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	100	466.000		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) **	100	138.840	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor
		Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	100	178.800		Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) **	100	112.112	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor
		Kota Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	100	290.700		Kota Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	100	200.200	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Perhubungan Wilayah III Kelas A)					Perhubungan Wilayah III Kelas A) **			
		Kota Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	100	292.250		Kota Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) **	100	148.200	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor
		Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	100	555.000		Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) **	100	134.000	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	100	254.000		Kota Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) **	100	161.900	-Penyesuaian anggaran pemeliharaan gedung kantor
		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	100	321.500		Kota Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) **	100	306.000	
2	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				197.952.629	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				127.393.110	
		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,81	444.550		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	0,81	404.650	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan ; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,81	180.720		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	0,81	115.950	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,81	280.200		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	0,81	210.625	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,81	380.000		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	0,81	197.800	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,81	419.600		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	0,81	251.990	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,81	248.980		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	0,81	195.500	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pelaksanaan kegiatan ramp Check 36 Kegiatan -Pelaksanaan Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,98	1.502.080		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	0,98	433.440	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 2 Lokasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,97	1.957.000		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	0,97	330.300	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3 Lokasi
		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,97	1.116.650		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	0,97	332.253	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3 Lokasi
		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,97	1.387.880		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	0,97	466.840	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 3 Lokasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,97	975.880		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	0,97	399.040	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 5 Lokasi
		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,98	1.005.680		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	0,98	335.700	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan 1 Lokasi
		Jawa Tengah	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah	0,981	335.000		Jawa Tengah	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah **	0,981	235.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; - Pemilihan Pelajar Pelopor dan Abdiyasa Teladan; Pengawasan Kendaraan Karoseri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jawa Tengah	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,42	33.776.320		Jawa Tengah	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan **	0,38	1.358.520	- Anggaran dan Target menyesuaikan kebutuhan; -Pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyaksebanyak 46 unit pada ruas jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro 39 Unit dan Jl. Lasem - Sale / Bts. Prov Jawa Timur 7 Unit.
		Jawa Tengah	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	0,5	830.000		Jawa Tengah	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis **	0,5	80.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penundaan review Tatravil dan Studi Jaringan Lintas
		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	0,2	1.000.000		Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonigiri, Sragen, Klaten	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	0,2	160.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	0,01	119.050		Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	0,01	50.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B
		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	0,24	200.000		Kendal, Demak, Semarang, Kota Semarang, Grobogan	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	0,24	100.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B
		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	0,23	220.000		Magelang, Temanggung, Purworejo, Wonosobo	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	0,23	50.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B
		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	0,21	380.000		Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	0,21	160.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	0,17	500.000		Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen	Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	0,17	50.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Pemeliharaan 1 Terminal Tipe B
		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Rasio konektivitas perkotaan	0,492	6.189.118		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Rasio konektivitas perkotaan **	0,48	874.690	-Target dan Anggaran menyesuaikan kebutuhan; '-Pengadaan dan Pemasangan 6 Unit Shelter
		Purworejo, Sukoharjo, Purwodadi, Banjarnegara	Rasio pemanfaatan terminal	0,22	17.775.000		Purworejo, Purwodadi	Rasio pemanfaatan terminal **	0,22	4.605.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; - Terminal Kutoarjo direncanakan selesai 2026 -Pembangunan Terminal Kutoarjo Tahap IV, Revitalisasi Terminal Purwodari
		Jawa Tengah	Rasio trayek angkutan jalan	0,51	1.168.660		Jawa Tengah	Rasio trayek angkutan jalan **	0,51	490.788	
		Jawa Tengah	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan	65,38	1.000.000		Jawa Tengah	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum **	65,38	924.955	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			umum								
		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	51	124.560.261		Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase Perpindahan moda angkutan umum **	51,72	114.580.069	-Anggaran dan target menyesuaikan kebutuhan; -Lanjutan Operasional 7 Koridor dengan 115 Bus
3	PENGELOLAAN PELAYARAN				4.009.100	PENGELOLAAN PELAYARAN				459.100	
		Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	0,31	3.809.100		Jawa Tengah	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP **	0,31	419.100	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan; -Penundaan Pembangunan plengsengan dermaga sungai Dukuh Lutungmati Tahap II Kabupaten Batang namun hanya fasilitasi perijinan dermaga sungai - Penundaan Pemeliharaan pelabuhan regional (belum ada kejelasan P3D)
		Kendal, Batang	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	0,2	200.000		Kendal, Batang	Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai **	0,20	40.000	-Anggaran menyesuaikan kebutuhan;

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				4.443.895	PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN				1.266.866	
		Cilacap, Purworejo	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	0,08	4.443.895		Cilacap, Purworejo, Sragen, Grobogan	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan **	0,04	1.266.866	-Target dan anggaran menyesuaikan kebutuhan - Penyesuaiaan anggaran pemeliharaan EWS dan Palang Pintu - Pemenuhan Fasilitas Keselamatan di 3 perlintasan sebidang di JPL 446 Kab. Cilacap; JPL 610 Kab. Purworejo dan JPL 146 Kab. Sragen
	JUMLAH				291.103.846	JUMLAH				192.663.821	

Sumber : Hasil Analisis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Keterangan : Rancangan awal RKPD Tahun 2024 memuat program, belum kegiatan. Oleh karena itu dalam tabel ini yang dituangkan dan dianalisis hanya sampai program dan indikator kinerja yang dibandingkan dengan usulan

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Perangkat daerah Kabupaten/ Kota diperoleh dari pelaksanaan Musrenbangwil, Forum PD, Reses DPRD dan Usulan Masyarakat yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Usulan Program dan Kegiatan yang diakomodir Dinas Perhubungan merupakan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, selaras dengan program dan kegiatan kabupaten/kota, serta sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

Tabel 2.5.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				
1	Penambahan Penerangan jalan di jalan antar desa / antar kecamatan di Jawa Tengah baik dengan jalur listrik konvensional maupun aliran listrik berbasis tenaga Surya yang ramah lingkungan dengan prinsip hemat energi dan hemat anggaran.	Jawa Tengah	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Sinkron Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan kelengkapan jalan, dan pemenuhannya merupakan kewenangan sektor perhubungan sesuai dengan stauts jalannya. Untuk jalan antar kecamatan kewenangannya berada di kabupaten/kota masing-masing. Terkait Program pemasangan PJU-TS telah dilaksanakan oleh Kementerian ESDM.</li> <li>• Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.</li> </ul>
2	Pengadaan dan pemasangan LPJU di beberapa wilayah Kab Blora dan Kab Grobogan	Kab Blora dan Kab Grobogan	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Sinkron Pemenuhan penerangan jalan pada ruas jalan provinsi terutama pada ruas jalan strategis dan perbatasan sudah mulai diupayakan, diantaranya pada Kab. Blora pada ruas jalan Todanan - Ngawen-Blora sebanyak 10 Unit (TA. 2018) Dan Ruas Jalan Singget-Doplang-Cepu Sebanyak 30 Unit (TA.2021) Dan Pada Kabupaten Grobogan Pada Ruas Jalan Jl. Semarang - Godong Sebanyak 10 Unit (TA.2019) Dan 30 Unit (TA.2023); Ruas Jalan Jl.Purwodadi - Klambu / Bts Kab. Kudus Sebanyak 30 Unit (TA.2023) Dan Jl.Purwodadi - Geyer / Bts. Kab. Sragen Sebanyak 15 Unit (TA.2023). Untuk Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan (Jawa Tengah Bagian Barat dan Jawa Tengah Bagian Selatan-Timur) dan kawasan pariwisata</li> <li>• Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bandara Tunggul Wulung serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan.	Kab. Banyumas dan Kab. Cilacap	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	3 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah sinkron Pembangunan Bandara JB. Soedirman Purbalingga telah selesai pada tahun 2021 dengan panjang runway 1600 x 30 m dan luas terminal 400 m2 yang dapat didarati pesawat ATR. Bandara Tunggulwulung dengan Panjang runway 1400 x 30 m dan luas terminal 777 m2 yang dapat melayani pesawat ATR 72. Bandara ini lebih dikhususkan untuk sekolah penerbangan. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan telah dilaksanakan pembangunan jalan baru ke zona curah tahap 1 pada tahun 2021 dan tahap 2 pada tahun 2022 sepanjang 400m. Upaya yang dilakukan utamanya pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi dimana dilaksanakan FGD untuk mendapatkan langkah-langkah optimalisasi bandara bersama stakeholder terkait. Dan pada program pengelolaan pelayaran Utamanya pada kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang salah satunya dilaksanakan Rakor pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan yang membahas terkait rencana pengemangan pelabuhan.</li> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.</li> </ul>
4	Penyediaan penerangan jalan juga perlu perhatian khusus pemerintah, masih banyak penerangan jalan yang mati sehingga membahayakan pemudik , terutama kejahatan dijalan , contohnya pembegalan.	Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Sinkron Untuk Tahun 2024 Pengadaan LPJU diarahkan pada dukungan untuk mendukung konektifitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata. Untuk TA. 2024 direncanakan pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 46 Unit, dan penggantian LPJU sebanyak 95 Unit</li> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Perlu memperketat aturan KIR truk dan pengawasan truk yang melebihi kapasitas tonase.	Jawa Tengah	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah Sinkron Upaya yang dilakukan utamanya pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi , dengan Sub Kegiatan : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi. dimana forum tersebut untuk mengkoordinasikan dan menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara lintas kelembagaan dengan keluaran Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ</li> <li>• Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam masa reses.</li> </ul>
6	Bus trans jateng dan shelter yang ramah perempuan dan anak	Kota Semarang, Semarang, Banyumas, Purbalingga, Kendal, Surakarta, Sragen, Purworejo, Magelang, Grobogan, Sukoharjo, Wonogiri	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	7 Koridor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah Sinkron Saat ini sudah operasional 7 koridor trans jateng. Trans jateng juga terus berupaya untuk ramah perempuan dan anak diantaranya terdapat Pemisahan tempat duduk di dalam bus; Penyediaan kursi prioritas untuk ibu hamil; Penyediaan ruang laktasi di terminal serta Program edutrip/pengenalan angkutan umum pada anak usia dini;. Penyediaan ruang khusus/pengguna kursi roda di dalam bus; Penyediaan ramp di beberapa shelter; Pelatihan pramujasa terkait sensitivitas dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas dengan narasumber dari Forum Inklusi Disabilitas.</li> <li>• Diusulkan DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada Forum Renja PD</li> </ul>
7	Peningkatan keselamatan lalu lintas dengan kalayakan transportasi (ramp check) secara kontinyu dan edukasi serta penegakan hukum sopir	Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah</li> <li>• Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah Sinkron Pada Tahun 2024 terdapat kegiatan rutin diantaranya ramp check pada 22 Terminal Tipe B di 6 (enam) BPSPP Wilayah serta pelaksanaan pemilihan abdi yasa teladan dan pelajar pelopor yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi pengemudi angkutan dan pelajar di jawa</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>tengah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diusulkan Ditlantas Polda Jateng pada Forum Renja PD</li> </ul>
8	Terminal Penggaron dapat diprioritaskan pembangunan	Kota Semarang	Rasio pemanfaatan terminal	1 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Sinkron Pada Tahun 2018-2021 telah dilakukan pembangunan terminal penggaron. Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun Anggaran 2024 direncanakan dilakukan pemeliharaan terminal penggaron.</li> <li>Diusulkan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Forum Renja PD</li> </ul>
9	Perbaikan sarana dan prasarana Terminal Drs. Prayitno.	Kab. Magelang	Rasio pemanfaatan terminal	1 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Sinkron Pada Perubahan Anggaran Tahun 2023 direncanakan akan dilakukan pemeliharaan berupa perbaikan landasan di terminal Drs. Prayitno.</li> <li>Diusulkan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang pada Forum Renja PD</li> </ul>
10	Pengadaan dan Pemasangan asilitas dan Perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) Lampu Penenrangan Jalan Umum (LPJU)	Ruas Jalan Kaliwungu - Boja	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Sinkron Ruas Jalan tersebut merupakan Ruas Jalan Kabupaten yang diusulkan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi.</li> <li>Diusulkan Bupati Kendal No. Surat 050/1118/2023 Tanggal 31 Maret 2023</li> </ul>
11	Pemeliharaan Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan	Kab. Pekalongan	Rasio pemanfaatan terminal	1 Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Singkron Untuk Tahun 2024 dan perubahan tahun 2023 direncanakan kegiatan pemeliharaan terminal berupa perbaikan landasan. Dan pada Renstra Dinas Perhubungan 2024-2026 akan dilakukan revitalisasi pada tahun 2026.</li> <li>Diusulkan Ketua Organda Kabupaten Pekalongan</li> </ul>
12	Penerangan Jalan di Jembatan Kereta Api Plengkung Sejayan	Kab. Temanggung	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Singkron Pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 direncanakan pemasangan LPJU pada Bulu Temanggung - Pertigaan</li> </ul>

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>Bulu sebanyak 6 Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam dialog interaktif RKPD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
13	Pemberian Rambu Peringatan kendaraan dimensi besar (truck) agar tidak masuk ruas jalan temanggung - pertigaan bulu karena terdapat Jembatan Plengkung (tidak memungkinkan untuk dilewati)	Kab. Kendal	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Singkron</li> <li>Pada Tahun 2024 terdapat pengadaan dan pemasangan rambu sebanyak 180 Unit di Jawa Tengah</li> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam dialog interaktif RKPD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
14	Penambahan cermin tikungan pada ruas Pemalang - Purbalingga	Kab. Pemalang	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah Singkron</li> <li>Pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 direncanakan pemasangan Cermin Tikungan pada Ruas Pemalang - Purbalingga sebanyak 5 Unit</li> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam dialog interaktif RKPD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
15	Penyediaan penerangan pada ruas jalan Weleri - Patean / Bts. Kab. Kendal (Desa Kebumen)	Kab. Kendal	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	5 Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Singkron</li> <li>Untuk Tahun 2024 Pengadaan LPJU diarahkan pada dukungan untuk mendukung konektifitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata. Untuk TA. 2024 direncanakan pengadaan dan pemasangan LPJU sebanyak 46 Unit, dan penggantian LPJU sebanyak 95 Unit</li> <li>Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam dialog interaktif RKPD Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
16	Penyediaan penerangan pada ruas jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan	Kab. Jepara	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum Singkron</li> <li>Untuk Tahun 2024 Pengadaan LPJU diarahkan pada dukungan untuk mendukung konektifitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata. Untuk TA. 2024 direncanakan pengadaan dan pemasangan LPJU</li> </ul>



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>sebanyak 46 Unit, dan penggantian LPJU sebanyak 95 Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diusulkan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam dialog interaktif RKPDP Tahun Anggaran 2024.</li> </ul>
17	Peningkatan terminal pecangaan dan welahan dari Terminal Tipe C menjadi tipe B	Kab. Jepara	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	2 Terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah Singkron Sesuai dengan RPD 2024-2026 dan RKPDP 2024 Kebutuhan rencana strategis yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diperlukan sebagai salah satunya yaitu peningkatan status terminal tipe C ke terminal tipe B di Jepara.</li> <li>• Diusulkan Bupati Jepara melalui Surat No. 551.22/4354 tanggal 27 Oktober 2023</li> </ul>
18	Pembukaan Koridor Bus Trans Jateng Koridor Semarang - Jepara	Kab. Jepara, Kota Semarang, Kab Demak	Persentase perpindahan moda angkutan umum	1 Koridor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum Singkron</li> <li>• Dalam Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 difokuskan untuk peningkatan konektivitas perkotaan melalui penambahan shelter (tidak menambah koridor baru) selain itu pada Wilayah Pengembangan Jekutibanglor atau antar WP (Kedungsepur dan Jekutibanglor) belum ada dokumen perencanaannya.</li> <li>• Diusulkan Bupati Jepara melalui Surat No. 551 /4344 tanggal 27 Oktober 2023</li> </ul>

Sumber : Hasil Identifikasi Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2023

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas nasional Tahun 2024 dalam RKP 2024 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi Pelayanan Publik.

Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024 mengacu pada Prioritas Nasional ke-5 (lima), Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Fokus utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Keselamatan Transportasi, Terwujudnya Konektivitas Nasional , Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan sedangkan agenda prioritas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu pariwisata, logistik, DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan), pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan peningkatan mutu SDM transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Mendasarkan RKP 2024, Isu utama dan tantangan dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan transportasi serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan transportasi dan musibah lainnya antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
2. Masih banyaknya lokasi rawan kecelakaan (*Blackspot*) termasuk pada lintas jalan utama/jalur logistic;

3. Pelanggaran kelebihan dimensi dan muatan angkutan jalan yang sering menyebabkan kecelakaan;
4. Masih lambatnya penanganan korban kecelakaan termasuk di sejumlah lokasi rawan kecelakaan;
5. Kecelakaan kapal pada jalur utama pelayaran akibat keterbatasan sarana navigasi;
6. Upaya peningkatan keberhasilan penyelamatan masih terkendala pada terbatasnya ketersediaan SDM, sarana, serta prasarana pencarian dan pertolongan.

Pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, isu terkait keselamatan transportasi juga masih mendapatkan perhatian, diantaranya :

1. Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan, pemenuhan perlengkapan jalan di ruas jalan provinsi;
2. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Keselamatan Sarana Transportasi di Terminal Tipe B dan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum;
3. Peningkatan peran Forum LLAJ;
4. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (berupa life jacket, rambu keselamatan, papan SOP penyeberangan).

Isu utama dan tantangan dalam penyediaan transportasi perkotaan dalam RKP 2024 adalah belum tersedianya layanan angkutan umum massal yang efisien, efektif, murah, nyaman, dan tepat waktu, serta sesuai dengan kebutuhan mobilitas di wilayah kota metropolitan dan kota besar. Sementara, dalam pelaksanaan *Major Project* pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan di wilayah metropolitan masih menghadapi tantangan antara lain :

1. Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan sistem angkutan massal yang mengacu kepada upaya memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan yang terpadu dengan pengembangan wilayah metropolitan serta penyelenggaraan pelayanan integrasi antarmoda;
2. Belum terbentuknya kerangka kelembagaan yang memiliki kemampuan mengintegrasikan pengembangan dan penyelenggaraan transportasi perkotaan lintas wilayah administrasi dan lintas sistem angkutan di kawasan metropolitan;
3. Terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam pengembangan dan penyelenggaraan sistem angkutan umum massal perkotaan;

4. Kerangka regulasi yang bersifat menyeluruh untuk penyediaan fasilitas dukungan pendanaan untuk pembangunan proyek angkutan massal perkotaan di wilayah metropolitan.

Pada Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, penyediaan transportasi perkotaan juga masih menjadi perhatian penuh dengan dilanjutkannya operasional 7 (tujuh) koridor layanan angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan (Trans Jateng). Dengan adanya transportasi perkotaan ini diharapkan dapat mengurangi emisi GRK hal tersebut juga sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024 Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.

Telaah kebijakan sebagai mana persandingan berikut :

RKP 2024	Renja Kementerian Perhubungan	Renja Dinas Perhubungan Provinsi
<p>Prioritas Nasional ke-5 (lima), Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.</p> <p>Tema RKP 2024 : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</p> <p>Arah Kebijakan utamanya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi</li> <li>• Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</li> </ul>	<p>Fokus utama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya Keselamatan Transportasi,</li> <li>• Terwujudnya Konektivitas Nasional ,</li> <li>• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan dan</li> <li>• Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan</li> </ul> <p>Agenda prioritas Kementerian Perhubungan Tahun 2024 yaitu konektivitas pariwisata, logistik, DTPK (Daerah Terpenting Perbatasan Kepulauan), pembangunan Ibu Kota Negara Baru dan peningkatan mutu SDM transportasi.</p>	<p>Strategi kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2024 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan keterhubungan antar melalui dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi, meningkatkan kemudahan perpindahan Antarmoda serta mengembangkan sistem jaringan dan simpul transportasi;</li> <li>• Meningkatkan keselamatan layanan transportasi dengan meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan implementasi regulasi, serta meningkatkan kualitas SDM Transportasi dan keterlibatan masyarakat;</li> <li>• Meningkatkan kualitas layanan angkutan umum dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, mengoptimalkan penerapan teknologi dan meningkatkan integrasi antar moda transportasi</li> </ul>

Sumber : Hasil Analisis 2023

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada sub bab sebelumnya yang dikaitkan dengan target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 3.1

## Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Kinerja Tujuan Dan Sasaran (4)	Satuan (5)	Target (6)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi		Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,053
		Meningkatnya konektivitas provinsi	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,38
		Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	16,098
		Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum	<i>On Time Performance</i> layanan transportasi	%	83,22
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,28
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,25
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,2

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Prov. Jateng, 2023

### 3.3. Manajemen Risiko Strategis Perangkat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis.

Hasil identifikasi terdapat 4 (empat) pernyataan Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diantaranya :

1. Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP pada Sasaran Meningkatkan konektivitas Provinsi;
2. Meningkatnya frekuensi kecelakaan transportasi pada Sasaran Meningkatkan keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah;
3. Kemacetan lalu lintas pada Sasaran Meningkatkan Kualitas layanan angkutan umum; dan
4. Kerusakan kendaraan saat perjalanan Sasaran Meningkatkan Kualitas layanan angkutan umum.

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sesuai tabel berikut.

Tabel 3.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Human Error</i>;</li> <li>2. Ketidak laikan kendaraan;</li> <li>3. Cuaca/ bencana;</li> <li>4. Kondisi Medan ;</li> <li>5. Fasilitas keselamatan</li> </ol>	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon penanganan, Sosialisasi <i>call center</i> fasilitas kesehatan, Sosialisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
Meningkatnya Kualitas layanan angkutan umum	On Time Performance Layanan Transportasi	Kemacetan lalu lintas	4	Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana)	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat		Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
		Kerusakan kendaraan saat perjalanan	12	Belum optimalnya perawatan kendaraan	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Monitoring berkala Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (Penerapan Check Point Kendaraan)	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi serta Musrenbangwil. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan

##### a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa lanjutan operasional 7 koridor lama (Koridor Semarang-Bawen, Semarang-Kendal, Purwokerto-Purbalingga, Kutoarjo-Borobudur, Solo-Sumber Lawang Via Sangiran; Semarang-Gubug dan Solo-Sukoharjo-Wonogiri) dengan 115 Bus; Kegiatan peningkatan terminal angkutan jalan berupa rehabilitasi dan pembangunan terminal tipe B sebanyak 2 terminal, yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B Kutoarjo Tahap IV serta Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B Purwodadi Kab. Grobogan; kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan utamanya dengan pengadaan dan pemasangan LPJU di utamanya mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu mendukung konektivitas Kawasan strategis yaitu UNESCO Global Geopark Wonogiri, kawasan perbatasan dan kawasan pariwisata sebanyak sebanyak 46 unit pada ruas jalan Wuryantoro - Eromoko - Pracimantoro 39 Unit dan Jl. Lasem - Sale / Bts. Prov Jawa Timur 7 Unit; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa peningkatan peran Forum LLAJ dalam implementasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ).

Program ini adalah dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Rasio Trayek Angkutan Jalan; Rasio Pemanfaatan Terminal; Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis; Rasio Keterisian Bus (pada semua BPSPP Wilayah); Rasio Konektivitas Perkotaan; Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan; Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani (pada semua BPSPP Wilayah); Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah; Rasio Hasil rekomendasi *ramp check* (pada semua BPSPP Wilayah); Persentase Perpindahan moda angkutan umum; dan Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum.

#### b. Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi utamanya berupa Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan pemenuhan fasilitas keselamatan sungai berupa life jacket, rambu keselamatan dan papan SOP; kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional berupa fasilitasi dan koordinasi pengelolaan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (sambil menunggu penyelesaian proses P3D dan transisinya); kegiatan penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP serta Rasio pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai.

#### c. Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian utamanya berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api di 3 perlintasan sebidang yaitu JPL 446 Kab. Cilacap; JPL 610 Kab. Purworejo dan JPL 146 Kab. Sragen (pemasangan sesuai dengan Pedoman teknis pengendalian lalu lintas di ruas jalan pada lokasi potensi kecelakaan di perlintasan sebidang dengan kereta api) serta fasilitasi implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya rencana reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif.

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan.

Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan tercantum pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi							129.119.076.000		172.141.459.000
	Meningkatnya keselamatan perjalanan transportasi di Jawa Tengah *			Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,053		6,308	
							6.574.474.000		20.468.400.000
				Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan *	Angka	16,098	6.574.474.000	15,238	20.468.400.000
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **				5.267.608.000		17.835.005.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	Angka	0,81	404.650.000	0,84	404.650.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ***				404.650.000		404.650.000
				Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	Unit	21596	404.650.000	22676	404.650.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				363.800.000		363.800.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	363.800.000	36	363.800.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				40.850.000		40.850.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	40.850.000	2	40.850.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	Angka	0,81	115.950.000	0,84	115.950.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ***				115.950.000		115.950.000
				Jumlah total kendaraan yang di ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ***	Unit	989	115.950.000	1038	115.950.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				95.950.000		95.950.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	95.950.000	36	95.950.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				20.000.000		20.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	20.000.000	2	20.000.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	Angka	0,81	210.625.000	0,84	210.625.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ***				210.625.000		210.625.000
				Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	Unit	2229	210.625.000	2340	210.625.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				185.625.000		185.625.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	185.625.000	36	185.625.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				25.000.000		25.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	25.000.000	2	25.000.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	Angka	0,81	197.800.000	0,84	197.800.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ***				197.800.000		197.800.000
				Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	Unit	6734	197.800.000	7071	197.800.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				167.800.000		167.800.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	167.800.000	36	167.800.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				30.000.000		30.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	Angka	0,81	251.990.000	0,84	251.990.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan ***				251.990.000		251.990.000
				Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	Unit	3485	251.990.000	3659	251.990.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				221.990.000		221.990.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	221.990.000	36	221.990.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				30.000.000		30.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000
				Rasio hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	Angka	0,81	195.500.000	0,84	195.500.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan ***				195.500.000		195.500.000
				Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ***	Unit	3998	195.500.000	4198	195.500.000
		2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****				165.500.000		165.500.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ****	Laporan	36	165.500.000	36	165.500.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				30.000.000		30.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	2	30.000.000	2	30.000.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	Angka	0,98	433.440.000	0,95	1.212.540.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				433.440.000		1.212.540.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ***	Angka	0,22	433.440.000	0,44	1.212.540.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				198.480.000		292.080.000
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	78	198.480.000	78	292.080.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ****				234.960.000		920.460.000
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	2	234.960.000	2	920.460.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	Angka	0,97	330.300.000	0,94	1.177.570.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				330.300.000		1.177.570.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ***	Angka	0,13	330.300.000	0,38	1.177.570.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				121.680.000		187.200.000
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	46	121.680.000	46	187.200.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ****				208.620.000		990.370.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	2	208.620.000	3	990.370.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	Angka	0,97	332.253.000	0,95	915.280.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				332.253.000		915.280.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ***	Angka	0,06	332.253.000	0,39	915.280.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				145.680.000		212.880.000
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	56	145.680.000	56	212.880.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas ****				186.573.000		702.400.000
				Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	1	186.573.000	4	702.400.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	Angka	0,97	466.840.000	0,94	1.634.840.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				466.840.000		1.634.840.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ***	Angka	0,07	466.840.000	0,43	1.634.840.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				145.680.000		212.880.000
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	56	145.680.000	56	212.880.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas ****				321.160.000		1.421.960.000
				Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	1	321.160.000	3	1.421.960.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	Angka	0,97	399.040.000	0,95	1.088.840.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				399.040.000		1.088.840.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ***	Angka	0,2	399.040.000	0,4	1.088.840.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				136.080.000		140.880.000
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	52	136.080.000	54	140.880.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas ****				262.960.000		947.960.000
				Jumlah Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	5	262.960.000	5	947.960.000
				Rasio kejadian kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	Angka	0,98	335.700.000	0,95	774.600.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Reayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				335.700.000		774.600.000
				Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ***	Angka	0,25	335.700.000	0,5	774.600.000
		2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****				150.480.000		145.680.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi ****	Laporan	58	150.480.000	56	145.680.000
		2.15.02.1.05.0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ****				185.220.000		628.920.000
				Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan ****	Unit	1	185.220.000	1	628.920.000
				Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah **	Angka	0,981	235.000.000	0,985	335.000.000
		2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ***				235.000.000		335.000.000
				Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah ***	Unit	438363	235.000.000	439863	335.000.000
		2.15.02.1.07.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi ****				200.000.000		300.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi ****	Laporan	135	200.000.000	135	300.000.000
		2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****				35.000.000		35.000.000
				Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum ****	Laporan	66	35.000.000	66	35.000.000
				Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan **	Angka	0,38	1.358.520.000	0,52	9.319.820.000
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ***				1.167.200.000		9.078.500.000
				Rasio perlengkapan jalan terpasang ***	Angka	0,63	1.167.200.000	0,66	9.078.500.000
		2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ****				1.167.200.000		9.078.500.000
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia ****	Unit	154	1.167.200.000	786	9.078.500.000
		2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ***				116.320.000		116.320.000
				Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng ***	Kabupaten/ Kota	15	46.320.000	17	46.320.000
		2.15.02.1.05.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****				46.320.000		46.320.000
				Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi ****	Dokumen	30	46.320.000	30	46.320.000
				Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ ***	Dokumen	12	70.000.000	12	70.000.000
		2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi ****				70.000.000		70.000.000
				Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi ****	Laporan	6	70.000.000	6	70.000.000
		2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi ***				75.000.000		125.000.000
				Jumlah rekomendasi / persetujuan andalalin di Jalan provinsi ***	Dokumen	329	75.000.000	390	125.000.000
		2.15.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin ****				75.000.000		125.000.000
				Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan ****	Dokumen	58	75.000.000	61	125.000.000
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN **				40.000.000		50.000.000
				Rasio pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai **	Angka	0,2	40.000.000	0,4	50.000.000
		2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				40.000.000		50.000.000
				Rasio fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi ***	Angka	0,11	40.000.000	0,18	50.000.000
		2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				40.000.000		50.000.000
				Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia Provinsi ****	Unit	28	40.000.000	25	50.000.000
		2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN **				1.266.866.000		2.583.395.000
				Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan **	Angka	0,04	1.266.866.000	0,24	2.583.395.000
		2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian ***				1.266.866.000		2.583.395.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian ***	Angka	0,341	1.266.866.000	0,698	2.583.395.000
		2.15.05.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian ****				-		-
				Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian ****	Dokumen	0	-	0	-
		2.15.05.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian ****				1.266.866.000		2.583.395.000
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian ****	Laporan	3	1.266.866.000	17	2.583.395.000
	<b>Meningkatnya konektivitas provinsi *</b>						<b>7.039.578.000</b>		<b>28.408.174.000</b>
				Rasio konektivitas provinsi *	Angka	0,38	7.039.578.000	0,423	28.408.174.000
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **				6.620.478.000		25.284.074.000
				Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis **	Angka	0,5	80.000.000	0,52	230.000.000
		2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ***				80.000.000		230.000.000
				Rasio implementasi dokumen RULLAJ ***	Angka	0,47	80.000.000	0,5	230.000.000
		2.15.02.1.01.0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ****				80.000.000		230.000.000
				Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi ****	Laporan	2	80.000.000	2	230.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A **	Angka	0,2	160.000.000	0,21	900.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				160.000.000		900.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A ****	Angka	0,25	160.000.000	0,5	900.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				160.000.000		900.000.000
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	160.000.000	9	900.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B **	Angka	0,01	50.000.000	0,02	130.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				50.000.000		130.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B ****	Angka	0,25	50.000.000	0,5	130.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				50.000.000		130.000.000
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	50.000.000	1	130.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A **	Angka	0,24	100.000.000	0,25	330.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				100.000.000		330.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A ****	Angka	0,25	100.000.000	0,5	330.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				100.000.000		330.000.000
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	100.000.000	3	330.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A **	Angka	0,23	50.000.000	0,24	220.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				50.000.000		220.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A ****	Angka	0,25	50.000.000	0,5	220.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				50.000.000		220.000.000
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	50.000.000	2	220.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A **	Angka	0,21	160.000.000	0,22	380.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				160.000.000		380.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A ****	Angka	0,25	160.000.000	0,5	380.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				160.000.000		380.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	160.000.000	3	380.000.000
				Rasio keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B **	Angka	0,17	50.000.000	0,18	220.000.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				50.000.000		220.000.000
				Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B ***	Angka	0,25	50.000.000	0,5	220.000.000
		2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				50.000.000		220.000.000
				Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara ****	Unit	1	50.000.000	2	220.000.000
				Rasio konektivitas perkotaan **	Angka	0,481	874.690.000	0,519	6.200.000.000
		2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ***				874.690.000		6.200.000.000
				Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi ***	Angka	0,61	874.690.000	0,743	6.200.000.000
		2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ****				874.690.000		6.200.000.000
				Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia ****	Unit	6	874.690.000	49	6.200.000.000
				Rasio pemanfaatan terminal **	Angka	0,218	4.605.000.000	0,229	15.940.974.000
		2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B ***				4.605.000.000		15.940.974.000
				Rasio terminal tipe B dalam kondisi baik ***	Angka	0,37	4.605.000.000	0,41	15.940.974.000
		2.15.02.1.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B ****				105.000.000		210.000.000
				Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B ****	Dokumen	1	105.000.000	2	210.000.000
		2.15.02.1.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****				1.000.000.000		5.650.000.000
				Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) ****	Unit	1	1.000.000.000	2	5.650.000.000
		2.15.02.1.03.0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang ****				3.500.000.000		10.080.974.000
				Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun ****	Unit	1	3.500.000.000	1	10.080.974.000
				Rasio trayek angkutan jalan **	Angka	0,51	490.788.000	0,56	733.100.000
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				40.000.000		130.620.000
				Rasio angkutan barang yang berijin ***	Angka	0,3	40.000.000	0,32	130.620.000
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				40.000.000		130.620.000
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi D ****	Unit	216	40.000.000	216	130.620.000
		2.15.02.1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				160.788.000		226.790.000
				Rasio kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi ***	Angka	0,71	160.788.000	0,86	226.790.000
		2.15.02.1.09.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi ****				90.500.000		105.000.000
				Jumlah dokumen kebijakan rencana umum jaringan trayek perkotaan kewenangan provinsi ****	Dokumen	1	90.500.000	1	105.000.000
		2.15.02.1.09.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi ****				70.288.000		121.790.000
				Jumlah dokumen sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan provinsi ****	Dokumen	7	70.288.000	7	121.790.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.1.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				115.000.000		100.000.000
				Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan ***	Angka	0,04	115.000.000	0,09	100.000.000
		2.15.02.1.11.0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi ****				80.000.000		-
				Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi D ****	Dokumen	1	80.000.000	0	-
		2.15.02.1.11.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi ****	Dokumen	1	35.000.000	1	100.000.000
		2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				100.000.000		60.000.000
				Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin ***	Angka	0,55	100.000.000	0,62	60.000.000
		2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ****				100.000.000		60.000.000
				Jumlah angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan ****	Unit	22	100.000.000	464	60.000.000
		2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				35.000.000		65.690.000
				Rasio angkutan taksi terpenuhi ***	Angka	0,43	35.000.000	0,44	65.690.000
		2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ****				35.000.000		65.690.000
				Jumlah Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan ****	Unit	76	35.000.000	76	65.690.000
		2.15.02.1.15	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				40.000.000		150.000.000
				Rasio trayek yang ditetapkan pemuktahiran tarif ***	Angka	1	40.000.000	1	150.000.000
		2.15.02.1.15.0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				40.000.000		150.000.000
				Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****	Laporan	1	40.000.000	1	150.000.000
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN **				419.100.000		3.124.100.000
				Rasio konektivitas transportasi laut dan ASDP **	Angka	0,31	419.100.000	0,38	3.124.100.000
		2.15.03.1.03	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan ***				60.000.000		200.000.000
				Rasio dokumen terlengkap sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya ***	Angka	0,2	60.000.000	0,4	200.000.000
		2.15.03.1.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ****				60.000.000		200.000.000
				Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan ****	Unit	2	60.000.000	4	200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas ***				70.000.000		315.000.000
				Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin ***	Angka	0,12	70.000.000	0,13	315.000.000
		2.15.03.1.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ****				70.000.000		315.000.000
				Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara ElektronikDO : ****	Dokumen	8	70.000.000	10	315.000.000
		2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional ***				79.100.000		1.359.100.000
				Berth occupancy ratio ****	Angka	0,44	79.100.000	0,45	1.359.100.000
		2.15.03.1.09.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional ****				79.100.000		209.100.000
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian perizinan ****	Unit	8	79.100.000	8	209.100.000
		2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional ****				-		1.150.000.000
				Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara ****	Unit	0	-	3	1.150.000.000
		2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				210.000.000		1.250.000.000
				Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi ***	Angka	0,48	210.000.000	0,53	1.250.000.000
		2.15.03.1.10.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				210.000.000		250.000.000
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan ****	Laporan	1	210.000.000	2	250.000.000
		2.15.03.1.10.0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				-		700.000.000
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang terbangun ****	Unit	0	-	1	700.000.000
		2.15.03.1.10.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				-		300.000.000
				Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan ****	Unit	0	-	1	300.000.000
	Meningkatnya kualitas layanan angkutan umum *						115.505.024.000		123.264.885.000
				On Time Performance layanan transportasi *	%	83,22	115.505.024.000	85,05	123.264.885.000
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) **				115.505.024.000		123.264.885.000
				Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum **	%	65,38	924.955.000	67,34	1.200.000.000
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				924.955.000		1.200.000.000
				Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani ***	Orang	3E+07	924.955.000	3E+07	1.200.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2.15.02.1.08.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi ****				924.955.000		1.200.000.000
				Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi ****	Laporan	3	924.955.000	3	1.200.000.000
				Persentase perpindahan moda angkutan umum **	%	51,72	114.580.069.000	53	122.064.885.000
		2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ***				114.580.069.000		122.064.885.000
				Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan ***	Orang	7E+06	114.580.069.000	7E+06	122.064.885.000
		2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi ****				114.580.069.000		122.064.885.000
				Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi ****	Unit	115	114.580.069.000	109	122.064.885.000
<b>Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah</b>							<b>63.544.745.000</b>		<b>73.945.197.000</b>
				Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	78,28		78,48	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah *						<b>63.198.145.000</b>		<b>73.465.146.000</b>
				Indeks Kepuasan Masyarakat *	Angka	80,25	63.198.145.000	80,5	73.465.146.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				63.198.145.000		73.465.146.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) **	%	100	200.200.000	100	293.200.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				105.000.000		113.000.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	105.000.000	100	113.000.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				44.500.000		44.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	44.500.000	1	44.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				12.000.000		12.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	12.000.000	1	12.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				11.000.000		11.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	11.000.000	1	11.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				5.500.000		5.500.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	5.500.000	1	5.500.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				17.000.000		15.000.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	17.000.000	1	15.000.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		25.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				43.200.000		43.200.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				43.200.000		43.200.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	43.200.000	12	43.200.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				45.000.000		110.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	21	45.000.000	21	110.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				10.000.000		10.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	20	10.000.000	20	10.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) **	%	100	112.112.000	100	202.112.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	5	2.000.000	5	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				62.112.000		67.112.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	62.112.000	100	67.112.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				35.500.000		35.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	35.500.000	1	35.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				3.000.000		3.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				1.000.000		1.000.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	1.000.000	1	1.000.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				5.612.000		5.612.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	5.612.000	1	5.612.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		20.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				7.000.000		7.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	12	7.000.000	12	7.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				7.000.000		7.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	1	7.000.000	1	7.000.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				36.000.000		101.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	2	36.000.000	2	101.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				1.000.000		1.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	1.000.000	1	1.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) **	%	100	138.840.000	100	230.840.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				72.840.000		77.840.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	72.840.000	100	77.840.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				37.500.000		37.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				1.500.000		1.500.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				9.840.000		9.840.000
				Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	9.840.000	1	9.840.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		20.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				20.000.000		22.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	24	20.000.000	24	22.000.000
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				-		2.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	0	-	12	2.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				20.000.000		20.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	20.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				39.000.000		104.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	11	39.000.000	11	104.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	10	4.000.000	10	4.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) **	%	100	148.200.000	100	238.200.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				77.200.000		82.200.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	77.200.000	100	82.200.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				37.500.000		37.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	37.500.000	1	37.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				1.500.000		1.500.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				14.200.000		14.200.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	14.200.000	1	14.200.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		20.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				25.000.000		25.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				25.000.000		25.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	25.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				39.000.000		104.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	8	39.000.000	8	104.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	7	4.000.000	7	4.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) **	%	100	161.900.000	100	257.900.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				88.500.000		98.500.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	88.500.000	100	98.500.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				38.500.000		38.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	38.500.000	1	38.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				6.000.000		6.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	5.000.000	1	5.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				22.000.000		22.000.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	22.000.000	1	22.000.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		25.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				26.400.000		27.400.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	24	26.400.000	24	27.400.000
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				-		1.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	0	-	12	1.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				26.400.000		26.400.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	26.400.000	12	26.400.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				40.000.000		105.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	16	40.000.000	16	105.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	15	5.000.000	15	5.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) **	%	100	134.000.000	100	224.000.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		25.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	25.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		25.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				74.000.000		79.000.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	74.000.000	100	79.000.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				36.500.000		36.500.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	36.500.000	1	36.500.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	4.000.000	1	4.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				3.000.000		3.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				1.500.000		1.500.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	1.500.000	1	1.500.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				14.000.000		14.000.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	14.000.000	1	14.000.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	20.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				15.000.000		15.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	24	15.000.000	24	15.000.000
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				10.000.000		10.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	10.000.000	12	10.000.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				38.000.000		103.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	9	38.000.000	9	103.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				35.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	35.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				3.000.000		3.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	8	3.000.000	8	3.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) **	%	100	306.000.000	100	369.500.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				2.000.000		2.000.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	1	2.000.000	1	2.000.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				2.000.000		2.000.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	2.000.000	12	2.000.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				5.000.000		5.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	5.000.000	100	5.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	12	5.000.000	12	5.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				41.500.000		51.500.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	41.500.000	100	51.500.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				7.000.000		7.000.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	7.000.000	1	7.000.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				6.000.000		6.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	6.000.000	1	6.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				10.500.000		10.500.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	10.500.000	1	10.500.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				3.000.000		3.000.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	3.000.000	1	3.000.000
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				15.000.000		25.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	15.000.000	12	25.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				5.000.000		5.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	5.000.000	12	5.000.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				252.500.000		306.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	7	252.500.000	7	306.000.000
		X.XX.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ****				200.000.000		200.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara ****	Unit	1	200.000.000	1	200.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				50.000.000		100.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	50.000.000	1	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				2.500.000		6.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	5	2.500.000	5	6.000.000
				Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat) **	%	100	61.996.893.000	100	71.649.394.000
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ***				46.370.662.000		49.672.472.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ***	Dokumen	2	46.370.662.000	2	49.672.472.000
		X.XX.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ****				45.580.462.000		48.652.272.000
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ****	Orang	300	45.580.462.000	300	48.652.272.000
		X.XX.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ****				720.200.000		820.200.000
				Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN ****	Dokumen	12	720.200.000	12	820.200.000
		X.XX.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD ****				70.000.000		200.000.000
				Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah ****	Laporan	12	70.000.000	12	200.000.000
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ***				1.155.000.000		1.897.216.000
				Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah ***	Dokumen	1	1.155.000.000	1	1.897.216.000
		X.XX.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ****				1.155.000.000		1.897.216.000
				Terlaksananya pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah ****	Dokumen	1	1.155.000.000	1	1.897.216.000
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ***				125.000.000		670.000.000
				Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan ***	%	100	125.000.000	100	670.000.000
		X.XX.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya ****				-		500.000.000
				Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan ****	Paket	0	-	1	500.000.000
		X.XX.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ****				20.000.000		20.000.000
				Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian ****	Dokumen	1	20.000.000	1	20.000.000
		X.XX.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi ****				105.000.000		150.000.000
				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ****	Orang	150	105.000.000	150	150.000.000
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah ***				2.145.900.000		2.188.000.000
				Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan ***	%	100	2.145.900.000	100	2.188.000.000
		X.XX.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ****				20.000.000		20.000.000
				Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan ****	Paket	1	20.000.000	1	20.000.000
		X.XX.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ****				48.000.000		88.000.000
				Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan ****	Paket	1	48.000.000	1	88.000.000
		X.XX.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ****				50.000.000		50.000.000
				Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan ****	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000
		X.XX.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor ****				200.000.000		200.000.000
				Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan ****	Paket	1	200.000.000	1	200.000.000
		X.XX.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ****				112.500.000		165.000.000
				Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan ****	Paket	1	112.500.000	1	165.000.000
		X.XX.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ****				5.000.000		5.000.000
				Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan ****	Dokumen	40	5.000.000	40	5.000.000
		X.XX.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu ****				60.000.000		100.000.000
				Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu ****	Laporan	12	60.000.000	12	100.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X.XX.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				1.590.400.000		1.500.000.000
				Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah ****	Laporan	12	1.590.400.000	12	1.500.000.000
		X.XX.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD ****				60.000.000		60.000.000
				Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah ****	Dokumen	12	60.000.000	12	60.000.000
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ***				-		2.305.000.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan ***	Unit	8	-	35	2.305.000.000
		X.XX.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				-		2.000.000.000
				Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan ****	Unit	0	-	1	2.000.000.000
		X.XX.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel ****				-		200.000.000
				Jumlah paket mebel yang disediakan ****	Paket	0	-	20	200.000.000
		X.XX.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				-		-
				Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	0	-
		X.XX.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				-		105.000.000
				Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan ****	Unit	0	-	10	105.000.000
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				11.062.931.000		13.129.306.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun ***	Laporan	36	11.062.931.000	36	13.129.306.000
		X.XX.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ****				4.000.000		4.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat ****	Laporan	12	4.000.000	12	4.000.000
		X.XX.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ****				1.589.225.000		1.811.000.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan ****	Laporan	12	1.589.225.000	12	1.811.000.000
		X.XX.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ****				9.469.706.000		11.314.306.000
				Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan ****	Laporan	12	9.469.706.000	12	11.314.306.000
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ***				1.137.400.000		1.787.400.000
				Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan ***	Unit	283	1.137.400.000	286	1.787.400.000
		X.XX.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ****				687.400.000		687.400.000
				Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya ****	Unit	73	687.400.000	73	687.400.000
		X.XX.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ****				50.000.000		50.000.000
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara ****	Unit	24	50.000.000	24	50.000.000
		X.XX.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ****				150.000.000		800.000.000
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	1	150.000.000	4	800.000.000
		X.XX.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				100.000.000		100.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	92	100.000.000	92	100.000.000
		X.XX.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ****				150.000.000		150.000.000
				Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi ****	Unit	93	150.000.000	93	150.000.000
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah *						346.600.000		480.051.000
				Indeks Manajemen Risiko *	Angka	3,2	346.600.000	3,3	480.051.000
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI **				346.600.000		480.051.000
				Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah **	%	100	346.600.000	100	480.051.000
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ***				346.600.000		480.051.000
				Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ***	%	100	346.600.000	100	480.051.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output), Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
						2024		2025	
						Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		X.XX.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ****				261.600.000		380.051.000
				Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah ****	Dokumen	9	261.600.000	9	380.051.000
		X.XX.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				85.000.000		100.000.000
				Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah ****	Laporan	4	85.000.000	4	100.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>192.663.821.000</b>		<b>246.086.656.000</b>

#### 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Subbab ini menyajikan hasil proses manajemen risiko di level program dan kegiatan prioritas tahun 2024. Program/kegiatan yang dilakukan proses manajemen risiko merupakan program/kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar pada ketercapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah.

Sesuai dengan perhitungan skala resiko terdapat pernyataan resiko yang membutuhkan Rencana Tindak Pengendalian. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sesuai tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah  
Tahun 2024

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Berkurangnya jumlah Angkutan umum yang beroperasi	9	Melampaui batas usia kendaraan, dampak covid	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat	Mendorong pengusaha angkutan umum melakukan perpanjangan ijin trayek sesuai aturan, Menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang, Gerakan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat, evaluasi trayek angkutan umum.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan taksi terpenuhi	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	6	Dampak covid, menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak berizin			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang melampaui batas usia kendaraan dan belum berizin	6	PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Berkurangnya jumlah armada angkutan AKDP	9	Usia armada AKDP melebihi batas 25 tahun	Pengusaha tidak mampu meremajakan armada	Mendorong pengusaha angkutan umum melakukan perpanjangan ijin trayek sesuai aturan, Menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang, Gerakan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat, evaluasi trayek angkutan umum.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam	Rasio Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Tarif angkutan AKDP yang dilaksanakan perusahaan	4	Tidak adanya kepatuhan perusahaan angkutan	Masyarakat semakin tidak berminat untuk menggunakan angkutan umum		Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		angkutan umum AKDP melebihi ketentuan / aturan yang telah ditetapkan dan Penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM		umum dan belum optimalnya evaluasi terhadap kenaikan komponen tarif dan load factor angkutan AKDP yang rata - rata < 50 %	karena lebih mahal dan tidak fleksibel			
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Jaringan trayek tidak dapat ditetapkan	9	Kendaraan Plat hitam tidak mau berubah menjadi plat kuning	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi	Monitoring angkutan pedesaan	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya jumlah layanan transportasi perkotaan	8	Penolakan dari pengusaha angkutan umum di koridor tersebut	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Pemanfaatan Terminal	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	4	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio terminal Tipe B dalam kondisi baik	Fasilitas terminal tipe b mengalami penurunan kualitas	4	penyerahan aset terminal dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dalam kondisi kurang memadai	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	12	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	monitoring kemajuan progress penyerahan aset terminal tipe b yang belum menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Jatranska	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rasio Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	12	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	monitoring kemajuan progress penyerahan aset terminal tipe b yang belum menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Jatranska	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Penurunan jumlah penumpang bus yang singgah di terminal tipe B	3	1. Enggannya masyarakat menggunakan fasilitas terminal 2. Lokasi Tterminal tidak strategis	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Perencanaan dan penganggaran rehabilitasi dan pemeliharaan berdasarkan inventarisasi kerusakan fasilitas terminal	Kepala BPSPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya kualitas pelayanan transportasi	6	Usia kendaraan AKDP sudah banyak yang mencapai usia batas maksimal yaitu 25 th dan banyak yang tidak mampu meremajakan	Kendaraan yang melayani transportasi yang berijin menurun dalam artian yang berkeselamatan & AU akan ditinggalkan masyarakat			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Mendata & melaporkan kebutuhan perawatan dan perbaikan	Kepala BPSPP Wilayah II	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah II Kelas B							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus Balai pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	9	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	Evaluasi penyelenggaraan terminal	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitasi terminal Tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Berkurangnya jumlah Bus yang masuk terminal tipe B	9	Tidak beroperasi nya Bus dikarenakan berkurangnya minat penumpang angkutan umum serta kemampuan perusahaan dalam biaya operasional	Masyarakat / Calon Penumpang di terminal tidak terlayani	Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Kepala BPSPP Wilayah IV	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	8	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa			



Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah IV Kelas A							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	12	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	Evaluasi penyelenggaraan terminal	Kepala BPSPP Wilayah V	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	2	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak Tercapainya target keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	1	Ketidaktaatan perusahaan angkutan umum untuk memasuki terminal	Keterhamabatan pergerakan orang dan barang			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	4	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Menurunya tingkat kepuasan masyarakat penggunaan angkutan umum dan operator angkutan umum			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Perkotaan	Ada beberapa kawasan strategis di perkotaan yang belum terlayani	6	Keterbatasan kemampuan anggaran daerah	Tidak terlayani pembukaan rute di wilayah tersebut			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	9	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya TPB	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan	Sosialisasi/pendekatan dengan masyarakat bersama aparat setempat terkait lahan halte yang menggunakan bahu jalan (kepemilikan pemerintah)	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah - Kepala Seksi Sarana Prasarana	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	9	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi	Sosialisasi pemenuhan kelaiklautan kapal untuk keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarkan tingkatannya	Pengoperasian trayek penyeberangan tidak berijin	9	Pemilik/operator kapal tidak melakukan ijin trayek	Dokumen persyaratan ijin trayek tidak terpenuhi	Sosialisasi pentingnya pengajuan izin trayek penyeberangan	Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Fasilitas pelabuhan SDP tidak terpenuhi	2	Fasilitas Pelabuhan SDP yang tersedia tidak memadai	Kenyamanan penggunaan angkutan SDP tidak terpenuhi			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Terkendalanya legalitas perizinan badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, dan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pen, plabuhaenyewaan	12	pelaku usaha masih banyak yang belum paham tentang prosedur dalam pengajuan izin usaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan	Terdapat pelaku usaha yang belum berizin namun sudah menjalankan kegiatan usahanya dan masih terdapat pelaku usaha yang belum menyesuaikan perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perizinan melalui Sistem Pelayanan	Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang perizinannya belum menyesuaikan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dengan pendampingan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Bidang Pelayaran	1 tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		masih belum sempurnanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sampai dengan saat ini sering dilakukan perubahan/perubahan	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)			
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Berth occupancy ratio	Tidak tercapainya kunjungan kapal di pelabuhan yang menyebabkan pemanfaatan/utilitas dermaga kurang optimal	4	Dermaga belum siap operasi karena ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi, kompetensi SDM Penyelenggara Pelabuhan belum memadai dan kurangnya anggaran pengelolaan pelabuhan.	Terganggunya mobilitas penumpang kapal dan distribusi barang dari dan ke pelabuhan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	9	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	Koodinasi kepada pemangku kepentingan dan Kementerian Perhubungan (Usulan Bantuan Teknis)	Kepala Bidang Lalu lintas Jalan	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian	Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan	2	Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berpartisipasi	Terjadinya kecelakaan akibat kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	transportasi dan menurunnya tingkat pelayanan jaringan jalan (LoS dan Tundaan Lalu Lintas)		dalam penilaian lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	kurangnya disiplin berlalu lintas			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	rencana aksi hasil rekomendasi Forum LLAJ tidak di dukung penganggaran pada instansi terkait	6	masing - masing instansi memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran tersendiri	tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan			
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	Timbulnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	2	Pembangun/pe ngembang dari pusat kegiatan/permu kiman/infrastruktur tidak menyusun analisis dampak lalu lintas sebagai langkah mitigasi terhadap dampak	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat pembangunan/penge mbangan pusat kegiatan/peremukiman /infrastruktur			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio pemenuhan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan tidak dapat dipasang	6	tidak tersedianya ruang milik jalan	kebutuhan Perlengkapan jalan tidak dapat dipenuhi			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	Meningkatnya tingkat fatalitas dan resiko di lokasi DRK	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah I Kelas A							
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	12	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK	Koordinasi dengan pihak terkait sebagai bentuk pengendalian Risiko	Kepala BPSPP Wilayah I - Kepala Seksi Lalu Lintas	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Bertambahnya kejadian kecelakaan	6	Faktor human error, sarana prasarana, fasilitas perlengkapan jalan dan cuaca	meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	6	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	16	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Banyak titik DRK yang belum tertangani	9	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP Wilayah III - Kepala Seksi Lalu Lintas	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	meningkatnya kejadian kecelakaan pada DRK	1	banyaknya kejadian kecelakaan di DRK	Menurunnya keselamatan pengguna jalan pada DRK			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	belum terpenuhinya rehabilitasi DRK pada BPSPP Wilayah IV	1	Banyaknya lokasi DRK yang perlu ditangani pada BPSPP Wilayah IV	Menurunnya keselamatan pengguna jalan dikarenakan belum tertanganinya DRK pada BPSPP Wilayah IV			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	4	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	4	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	Meningkatnya kecelakaan di lokasi DRK sehingga tidak semua tertangani pada Balai Pengelola Sarana	1	Banyaknya kecelakaan yang terjadi sehingga tidak semuanya data ditangani	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Prasarana Wilayah VI						
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak tercapainya presentasi rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	1	Banyaknya DRK yang harus ditangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kendaraan laik jalan di jawa tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	6	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di jawa tengah	Menurunnya Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang lolos Uji Berkala	4	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	12	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	beroperasinya Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	9	Usia Kendaraan yang beroperasi diatas peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya angka kecelakaan akibat kendaraan tidak laik	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPP Wilayah I - Kepala Seksi Angkutan	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya ketertiban & kepatuhan pengusaha angkutan terkait armada	6	Kurangnya pengawasan dilapangan	Meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat Kendaraan tidak berkeselamatan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya kendaraan yang berkeselamatan	6	Pengusaha kurang perhatian terhadap perawatan kendaraan	Kendaraanya tidak nyaman & tidak berkeselamatan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	tidak terlaksananya rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	12	Perusahaan mengabaikan surat pemberitahuan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	12	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	Penetapan Sanksi yang lebih Massif sesuai dengan regulasi	Kepala BPSPP Wilayah III - Kepala Seksi Angkutan	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana	tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	6	Kurangnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Rekomendasi Rampcheck	Kendaraan yang Laik Jalan dan Tidak Sesuai SPM			



Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A							
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Tidak Optimalnya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4	Kurangnya Kompetensi SDM Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Serta kepatuhan Pelaksanaan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Tidak Maksimalnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	6	Perusahaan mengabaikan surat pemberitahuan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	6	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	meningkatnya kendaraan angkutan umum yang tidak berkeselamatan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana	1	Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Angkutan umum pada Terminail Tipe B Balai	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Perhubungan Wilayah VI Kelas A		Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A				
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan Teknis dan laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	1	Kurangnya Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS pada Terminail Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	12	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Memasukkan ke dalam dokumen Renstra Dinas	Kepala Bidang Jatraska	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	12	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Memasukkan ke dalam dokumen Renstra Dinas	Kepala Bidang Jatraska	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	kondisi Fasilitas pelabuhan SDP tidak optimal	12	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Kepala Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Menurunnya tingkat keselamatan penyeberangan sungai	12	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Kepala Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum	9	Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi	Kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan	Memperbaiki pelayanan angkutan umum dan memberikan kemudahan penumpang dalam melakukan pembayaran	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	12 bulan setiap tahun
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani sepi peminat atau kurang ideal nilai load factor penumpangnya	9	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte dan membangun TPB yang potensial banyak calon penumpang	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah- Kepala Seksi Operasional	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	rendahnya suplay Angkutan Umum pada masa lebaran natal tahun baru	4	Rendahnya jumlah Angkutan Umum yang laik jalan/operasi	Tingginya Jumlah Penumpang tidak terangkut			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Berkurangnya pengguna angkutan umum dan meningkatnya pengguna kendaraan pribadi	4	Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya jalan tol yang	berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pada masa libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru		memudahkan menggunakan kendaraan pribadi serta naiknya harga tiket angkutan umum pada saat momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru	daripada angkutan umum, terjadi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada ruas - ruas jalan sekitar lokasi wisata			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tingkat kinerja belum dilaporkan tepat waktu	9	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data	Desk evaluasi capain kinerja dan output pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	12 bulan setiap tahun
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	dokumen perencanaan dan evaluasi tidak berkualitas	9	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data	Desk evaluasi capain kinerja dan output pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	4 bulan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	6	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menggau pelayanan masyarakat			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	3	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	6	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah pada perangkat daerah							
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	4	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola	Menurunnya kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan	6	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. Dari dari sisi			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)			Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan,			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	6	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	daerah yang disusun							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	12	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk melakukan pemeliharaan atas gedung dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarana kantor lainnya.	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya proses pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan	9	Pengumpulan berkas SPJ kadang kurang sama kecepatannya antara seksi satu dengan yang lainnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan	Pembiayaan pelaksanaan kegiatan agak terganggu pelaksanaannya	Merencanakan kegiatan sesuai dengan target di RKO	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	pelaksanaan layanan administrasi	1	kurangnya SDM dan minimnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	yang sesuai dengan standar layanan	kepegawaian belum sesuai standar						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kurang optimalnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	9	kurangnya sumber daya penunjang kegiatan	sumber daya penunjang tidak tercukupi	Merencanakan kegiatan sesuai dengan target di RKO	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terlambatnya pembayaran upah tenaga pemungut sampah dan retribusi sampah	6	Pembayaran harus dilakukan secara manual di DLH kabupaten/kota tempat terminal tipe B	Anggaran jasa pelayanan umum kantor terserap tidak tepat waktu			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	9	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	melakukan pengawasan saat pengerjaan proyek	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah	kurang akuratnya pelaporan			



Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	kurangnya SDM pengelola yang mumpuni	terhambatnya layanan administrasi kepegawaian			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	4	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	9	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	12	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparaturnya pemerintahan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah IV Kelas A)							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	4	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	1	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dengan standar layanan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	1	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	1	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	Tidak terlaksananya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	1	kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, mengurangi estetika dan kenyamanan serta keselamatan pegawai dan pengunjung	Kurangnya pendataan guna pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	terdapat bangunan gedung yang kurang layak	1	Banyaknya jumlah dokumen yang tersedia guna memenuhi administrasi keuangan perangkat	Kurangnya inventarisasi dokumen yang tersedia sehingga tidak dapat memenuhi administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				daerah yang disusun				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelayanan administrasi umum perangkat daerah kurang memenuhi sesuai standar layanan	1	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak kesesuaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kebutuhan	1	Kerjasama di lingkungan kantor yang kurang memenuhi target pencapaian	Keterlambatan dalam penyediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai	9	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum,	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa	Mengecek realisasi pelaksanaan secara rutin agar dapat mengcover seluruh pelayanan sesuai target waktu	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Balai Transportasi Jawa Tengah)	Transportasi Jawa Tengah		kepegawaian dan keuangan tersedia	Tengah kurang maksimal			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Menurunnya tingkat administrasi layanan keuangan	6	Banyaknya administrasi layanan keuangan yang harus disusun tidak sebanding dengan jumlah ASN	Pelayanan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan umum yang sesuai standar layanan	9	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum tersedia	Pelayanan umum Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Mengecek realisasi pelaksanaan secara rutin agar dapat mengcover seluruh pelayanan sesuai target waktu	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Adanya permintaan tambahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Belum semua komponen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Pelayanan menjadi kurang maksimal			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Adanya permintaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	9	Belum semua unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilakukan pemeliharaan	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Melakukan pemeliharaan secara prioritas dan mengecek realisasi pelaksanaan secara rutin	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau	Banyak sarana dan prasarana kantor	12	Pemeliharaan sarana dan prasarana	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Melakukan pemeliharaan secara prioritas dan perawatan secara berkala agar tidak	Kepala BALAITRANS -	12 bulan setiap tahun

Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	yang mengalami kerusakan		kantor tidak mencakup seluruh rute		terjadi kerusakan yang terlalu parah	Kepala Sub Bag TU	

*Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023*

BAB V  
PENUTUP

1. Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mewadahi Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2024 serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target pembangunan Tahun 2024. Proses penyusunan Renja Tahun 2024 paralel / sinergi dengan dinamika proses P3D Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dimungkinkan belum selesai tuntas saat tahapan perencanaan berakhir. Di lain pihak, Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta bersifat logis, dinamis dan fleksibel agar berdaya guna dan berhasil guna. Target indikator, fokus dan lokus dalam Renja menyesuaikan dengan dinamika perubahan global, nasional dan regional serta ketersediaan anggaran berdasarkan pada kemampuan pendanaan daerah. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan dan adanya refocusing anggaran, akan berpengaruh terhadap pencapaian target;
2. Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan dari Renja adalah :
  - a. Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 mengacu kepada RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
  - b. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Awal Renja PD dengan mempertimbangkan masukan dari *Stakeholders* terkait dan menyelenggarakan Forum PD untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD;
  - c. Bappeda melakukan proses finalisasi RKPD Tahun 2024 melalui Forum Musrenbang;
  - d. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyempurnakan Renja PD berdasarkan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai Pergub.
3. Tindak lanjut dari Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 adalah dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam menyusun RKA-PD Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

Semarang, *16 November* 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



**HENGGAR BUDI ANGGORO, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710914 199703 1006



LAMPIRAN

Tabel 1 Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	Risiko Operasional	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Masyarakat
2	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Berkurangnya jumlah Angkutan umum yang beroperasi	Resiko Operasional	Melampaui batas usia kendaraan, dampak covid	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat	Mayarakat
3	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan taksi terpenuhi	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	Resiko kepatuhan	Dampak covid, menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak berizin	Perusahaan yang tertib administrasi serta memiliki kendaraan yang berijin
4	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang melampaui batas usia kendaraan dan belum berizin	Resiko kepatuhan	PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS	Perusahaan yang tertib administrasi serta memiliki kendaraan yang berijin
5	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Berkurangnya jumlah armada angkutan AKDP	Resiko Operasional	Usia armada AKDP melebihi batas 25 tahun	Pengusaha tidak mampu meremajakan armada	Masyarakat
6	Sasaran Kegiatan	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Trayek yang Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	Tarif angkutan AKDP yang dilaksanakan perusahaan angkutan umum AKDP melebihi ketentuan / aturan yang telah ditetapkan dan Penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM	Resiko Operasional, Resiko Kepatuhan	Tidak adanya kepatuhan perusahaan angkutan umum dan belum optimalnya evaluasi terhadap kenaikan komponen tarif dan load factor angkutan AKDP yang rata - rata < 50 %	Masyarakat semakin tidak berminat untuk menggunakan angkutan umum karena lebih mahal dan tidak fleksibel	Masyarakat/pengguna angkutan umum
7	Sasaran Kegiatan	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Jaringan trayek tidak dapat ditetapkan	Resiko Operasional	Kendaraan Plat hitam tidak mau berubah menjadi plat kuning	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Sasaran Kegiatan	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya jumlah layanan transportasi perkotaan	Resiko Strategis	Penolakan dari pengusaha angkutan umum di koridor tersebut	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat	Masyarakat
9	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Pemanfaatan Terminal	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	Risiko Operasional	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal	Masyarakat dan Dinas Perhubungan
10	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio terminal Tipe B dalam kondisi baik	Fasilitas terminal tipe b mengalami penurunan kualitas	Risiko Operasional	penyerahan aset terminal dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dalam kondisi kurang memadai	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Masyarakat
11	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	Risiko Operasional	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	Masyarakat
12	Sasaran Kegiatan	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rasio Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	Risiko Operasional	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	Masyarakat
13	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Penurunan jumlah penumpang bus yang singgah di terminal tipe B	Risiko Operasional	1. Enggannya masyarakat menggunakan fasilitas terminal 2. Lokasi Tterminal tidak strategis	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
14	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Masyarakat Pengguna Terminal
15	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya kualitas pelayanan transportasi	Risiko operasional	Usia kendaraan AKDP sudah banyak yang mencapai usia batas maksimal yaitu 25 th dan banyak yang tidak mampu meremajakan	Kendaraan yang melayani transportasi yang berijin menurun dalam artian yang berkeselamatan & AU akan ditinggalkan masyarakat	Masyarakat & BPSPP WIL.II
16	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	Risiko operasional	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Masyarakat & BPSPP WIL.II

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus Balai pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	risiko operasional	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	masyarakat
18	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	risiko operasional	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	masyarakat
19	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Berkurangnya jumlah Bus yang masuk terminal tipe B	Resiko Operasional	Tidak beroperasi nya Bus dikarenakan berkurangnya minat penumpang angkutan umu serta kemampuan perusahaan dalam biaya operasional	Masyarakat / Calon Penumpang di terminal tidak terlayani	Masyarakat Pengguna dan Pengguna Terminal
20	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	Resiko Operasional	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Masyarakat Pengguna dan Pengguna Terminal
21	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	risiko operasional	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	masyarakat
22	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	risiko operasional	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	masyarakat
23	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak Tercapainya target keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Resiko Kepatuhan	Ketidaktaatan perusahaan angkutan umum untuk memasuki terminal	Keterhamabatan pergerakan orang dan barang	Masyarakat penggunan angkutan umum dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
24	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	Resiko Operasional	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat penggunaan angkutan umum dan operator angkutan umum	Masyarakat pengguna terminal dan Operator Angkutan Umum
25	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU	Rasio Konektivitas Perkotaan	Ada beberapa kawasan strategis di	Resiko Operasional	Keterbatasan kemampuan anggaran daerah	Tidak terlayani pembukaan rute di wilayah tersebut	Pemerintah Daerah Kab/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		perkotaan yang belum terlayani				
26	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	Resiko Operasional	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya TPB	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan	Balai Transportasi Jawa Tengah
27	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Risiko Kebijakan	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi	Masyarakat
28	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Rasio dokumen terlengkapi sebagai persyaratan ijin trayek berdasarakan tingkatannya	Pengoperasian trayek penyeberangan tidak berijin	Risiko kepatuhan	Pemilik/operator kapal tidak melakukan ijin trayek	Dokumen persyaratan ijin trayek tidak terpenuhi	Masyarakat
29	Sasaran Kegiatan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Fasilitas pelabuhan SDP tidak terpenuhi	Risiko Kebijakan	Fasilitas Pelabuhan SDP yang tersedia tidak memadai	Kenyamanan penggunaan angkutan SDP tidak terpenuhi	Masyarakat
30	Sasaran Kegiatan	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Terkendalanya legalitas perizinan badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, dan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam	Risiko operasional	pelaku usaha masih banyak yang belum paham tentang prosedur dalam pengajuan izin usaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan masih belum sepenuhnya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sampai dengan saat ini sering dilakukan perubahan/perkembangan	Terdapat pelaku usaha yang belum berizin namun sudah menjalankan kegiatan usahanya dan masih terdapat pelaku usaha yang belum menyesuaikan perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				
31	Sasaran Kegiatan	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Berth occupancy ratio	Tidak tercapainya kunjungan kapal di pelabuhan yang menyebabkan pemanfaatan/utilitas dermaga kurang optimal	Risiko operasional	Dermaga belum siap operasi karena ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi, kompetensi SDM Penyelenggara Pelabuhan belum memadai dan kurangnya anggaran pengelolaan pelabuhan.	Terganggunya mobilitas penumpang kapal dan distribusi barang dari dan ke pelabuhan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.	Penyelenggara Pelabuhan dan masyarakat pengguna jasa pelabuhan
32	Sasaran Sasaran 2	Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	Risiko Operasional	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Masyarakat
33	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	Risiko Operasional	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	Masyarakat
34	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan menurunnya tingkat pelayanan jaringan jalan (LoS dan Tundaan Lalu Lintas)	Risiko Operasional	Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Terjadinya kecelakaan akibat kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan kurangnya disiplin berlalu lintas	Masyarakat Pengguna Jalan
35	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	rencana aksi hasil rekomendasi Forum LLAJ tidak di dukung penganggaran pada instansi terkait	Risiko Kemitraan	masing - masing instansi memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran tersendiri	tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan	Masyarakat Pengguna Jalan
36	Sasaran Kegiatan	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	Timbulnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	Risiko Operasional	Pembangun/pengembang dari pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur tidak menyusun analisis dampak lalu lintas sebagai langkah mitigasi terhadap dampak	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur	Masyarakat Pengguna Jalan
37	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio pemenuhan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan tidak dapat dipasang	Risiko Operasional	tidak tersedianya ruang milik jalan	kebutuhan Perlengkapan jalan tidak dapat dipenuhi	Masyarakat Pengguna Jalan
38	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi	Meningkatnya tingkat fatalitas dan resiko di lokasi DRK	Resiko Legal	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		JALAN (LLAJ)	yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A					
39	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	Resiko Operasional	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
40	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Bertambahnya kejadian kecelakaan	Risiko Operasional	Faktor human error, sarana prasarana, fasilitas perlengkapan jalan dan cuaca	meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas	masyarakat pengguna jalan
41	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	Risiko Operasional	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK	masyarakat pengguna jalan
42	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	risiko operasional	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	masyarakat
43	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Banyak titik DRK yang belum tertangani	risiko operasional	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	masyarakat
44	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	meningkatnya kejadian kecelakaan pada DRK	Resiko Operasional	banyaknya kejadian kecelakaan di DRK	Menurunnya keselamatan pengguna jalan pada DRK	Masyarakat / Pengguna Jalan
45	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	belum terpenuhinya rehabilitasi DRK pada BPSPP Wilayah	Resiko Operasional	Banyaknya lokasi DRK yang perlu ditangani pada BPSPP Wilayah IV	Menurunnya keselamatan pengguna jalan dikarenakan belum tertanganinya DRK pada BPSPP	Masyarakat / Pengguna Jalan

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Perhubungan Wilayah IV Kelas A	IV			Wilayah IV	
46	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	risiko operasional	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	masyarakat pengguna jalan
47	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	risiko operasional	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK	masyarakat
48	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya kecelakaan di lokasi DRK sehingga tidak semua tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Resiko Operasional	Banyaknya kecelakaan yang terjadi sehingga tidak semuanya data ditangani	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK	Masyarakat / Pengguna Jalan
49	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak tercapainya presentasi rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Resiko Operasional	Banyaknya DRK yang harus ditangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK	Masyarakat / Pengguna Jalan
50	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	Resiko Operasional	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan	Masyarakat pengguna jalan dan perusahaan karoseri
51	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah	Menurunnya Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang lolos Uji Berkala	Risiko Kepatuhan	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan	Masyarakat Pengguna Jalan
52	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	Resiko Operasional	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	beroperasinya Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	Resiko Operasional	Usia Kendaraan yang beroperasi diatas peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya angka kecelakaan akibat kendaraan tidak laik	Masyarakat pengguna jalan
54	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya ketertiban & kepatuhan pengusaha angkutan terkait armada	Resiko operasional	Kurangnya pengawasan dilapangan	Meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat Kendaraan tidak berkeselamatan	Masyarakat
55	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya kendaraan yang berkeselamatan	Resiko operasional	Pengusaha kurang perhatian terhadap perawatan kendaraan	Kendaraanya tidak nyaman & tidak berkeselamatan	Masyarakat
56	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	tidak terlaksananya rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	risiko operasional	Perusahaan mengabaikan surat pemberitahuan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	masyarakat
57	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	risiko kepatuhan	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	masyarakat
58	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	risiko operasional	Kurangnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Rekomendasi Rampcheck	Kendaraan yang Laik Jalan dan Tidak Sesuai SPM	masyarakat
59	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp	Tidak Optimalnya Kegiatan Audit dan	Risiko Operasional	Kurangnya Kompetensi SDM Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Tidak Maksimalnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	Masyarakat Pengguna Jalan



No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Serta kepatuhan Pelaksanaan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan		
60	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	risiko operasional	Perusahaan mengabaikan surat pemberitahuan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	masyarakat
61	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	risiko kepatuhan	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	masyarakat
62	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	meningkatnya kendaraan angkutan umum yang tidak berkeselamatan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Resiko Operasional	Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Angkutan umum pada Terminal Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Masyarakat pengguna angkutan umum / Pengguna Jalan
63	Sasaran Kegiatan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan Teknis dan laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Resiko Operasional	Kurangnya Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS pada Terminal Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Masyarakat pengguna angkutan umum / Pengguna Jalan
64	Sasaran Program	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	Risiko Strategis	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Masyarakat
65	Sasaran Kegiatan	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	Risiko Strategis	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Masyarakat
66	Sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN	Rasio pemenuhan	kondisi Fasilitas	Risiko	Fasilitas keselamatan	Keamanan dan keselamatan	Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Program	PELAYARAN	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	pelabuhan SDP tidak optimal	Kebijakan	penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	penyeberangan sungai tidak terpenuhi	
67	Sasaran Kegiatan	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai terpenuhi	Menurunnya tingkat keselamatan penyeberangan sungai	Risiko Kebijakan	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi	Masyarakat
68	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Umum	On Time Performance Layanan Transportasi	Kemacetan lalu lintas	Risiko Operasional	Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana)	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Masyarakat (pengguna trans jateng) dan Dinas Perhubungan
69	Sasaran Strategis			Kerusakan kendaraan saat perjalanan	Risiko Operasional	Belum optimalnya perawatan kendaraan	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Masyarakat (pengguna trans jateng) dan Dinas Perhubungan
70	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum	Resiko Operasional	Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi	Kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
71	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani sepi peminat atau kurang ideal nilai load factor penumpangnya	Resiko Operasional	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
72	Sasaran Program	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	rendahnya suplay Angkutan Umum pada masa lebaran natal tahun baru	Resiko operasional	Rendahnya jumlah Angkutan Umum yang laik jalan/operasi	Tingginya Jumlah Penumpang tidak terangkut	Masyarakat
73	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Berkurangnya pengguna angkutan umum dan meningkatnya pengguna kendaraan pribadi pada masa libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Resiko operasional	Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya jalan tol yang memudahkan menggunakan kendaraan pribadi serta naiknya harga tiket angkutan umum pada saat momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru	berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum, terjadi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada ruas - ruas jalan sekitar lokasi wisata	Operator Angkutan Umum, Masyarakat yang melaksanakan mudik
74	Sasaran Sasaran 1	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Resiko tidak teridentifikasi	Risiko Operasional	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data	Dinas Perhubungan
75	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja	Tingkat kinerja belum dilaporkan	Risiko Operasional	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal	Dinas Perhubungan

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Provinsi	perangkat daerah	tepat waktu			sebagai sumber data	
76	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	dokumen perencanaan dan evaluasi tidak berkualitas	Risiko Operasional	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data	Dinas Perhubungan
77	Sasaran Sasaran 2	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Protes masyarakat secara maif terhadap layanan perhubungan	Risiko Operasional	Sumber daya dinas perhubungan terbatas	Pelayanan tidak maksimal	Dinas Perhubungan
78	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	Risiko Operasional	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menggau pelayanan masyarakat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
79	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	Risiko Operasional	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
80	Sasaran Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	Risiko Operasional	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
81	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	Risiko Operasional	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
82	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
83	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
84	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
85	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Penyediaan tidak tepat waktu	Risiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemeliharaan					
86	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	Menurunnya kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan	Resiko Operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. Dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan,	Masyarakat dan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
87	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Risiko Operasional	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
88	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	Risiko Operasional	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian kurang maksimal	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
89	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	Resiko Operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
90	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	Resiko Operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
91	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	Resiko Operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
92	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	risiko operasional	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan	masyarakat & Pegawai

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya proses pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan	Resiko operasional	Pengumpulan berkas SPJ kadang kurang sama kecepatannya antara seksi satu dengan yang lainnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan	Pembiayaan pelaksanaan kegiatan agak terganggu pelaksanaannya	BPSPP Wil. II
94	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian belum sesuai standar	risiko operasional	kurangnya SDM dan minimnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum	masyarakat & Pegawai
95	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kurang optimalnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	Resiko operasional	kurangnya sumber daya penunjang kegiatan	sumber daya penunjang tidak tercukupi	BPSPP Wil. II
96	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terlambatnya pembayaran upah tenaga pemungut sampah dan retribusi sampah	Resiko operasional	Pembayaran harus dilakukan secara manual di DLH kabupaten/kota tempat terminal tipe B	Anggaran jasa pelayanan umum kantor terserap tidak tepat waktu	BPSPP Wil. II
97	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	Resiko operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	BPSPP Wil. II
98	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	risiko operasional	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP	masyarakat & Pegawai
99	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	risiko operasional	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	kurang akuratnya pelaporan	masyarakat & Pegawai
100	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	risiko operasional	kurangnya SDM pengelola yang mumpuni	terhambatnya layanan administrasi kepegawaian	masyarakat & Pegawai
101	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai	risiko operasional	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum	masyarakat & Pegawai

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sesuai standar layanan	standar				
102	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	risiko operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan	masyarakat & Pegawai
103	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	risiko operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	masyarakat & Pegawai
104	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	risiko operasional	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP	masyarakat & Pegawai
105	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	risiko operasional	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	masyarakat & Pegawai
106	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	risiko operasional	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	masyarakat & Pegawai
107	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	risiko operasional	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas	Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
108	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	risiko operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	masyarakat & Pegawai
109	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	risiko operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	masyarakat & Pegawai

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pemeliharaan					
110	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	risiko operasional	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP	masyarakat & Pegawai
111	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	risiko operasional	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran	masyarakat & Pegawai
112	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	risiko operasional	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	masyarakat & Pegawai
113	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	risiko operasional	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum	masyarakat & Pegawai
114	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	risiko operasional	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat	masyarakat & Pegawai
115	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	risiko operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	masyarakat & Pegawai
116	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	Tidak terlaksananya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Resiko Kemitraan	Banyaknya kebutuhan pelayanan umum sehingga tidak sesuai target pemenuhan	Kurangnya pendataan guna pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI
117	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang	Tidak sesuaianya dokumen administrasi	Resiko Kemitraan	Banyaknya jumlah dokumen yang tersedia guna memenuhi administrasi keuangan perangkat	Kurangnya inventarisasi dokumen yang tersedia sehingga tidak dapat memenuhi administrasi keuangan	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah

No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			disusun	keuangan perangkat daerah		daerah yang disusun	perangkat daerah yang disusun	VI
118	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	Resiko Kepatuhan	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI
119	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelayanan administrasi umum perangkat daerah kurang memenuhi sesuai standar layanan	Resiko Kepatuhan	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah	Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI
120	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak kesesuaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kebutuhan	Resiko Operasional	Kerjasama di lingkungan kantor yang kurang memenuhi target pencapaian	Keterlambatan dalam penyediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Dinas Perhubungan
121	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	Resiko Operasional	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Dinas Perhubungan
122	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	Resiko Operasional	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
123	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Menurunnya tingkat administrasi layanan keuangan	Resiko Operasional	Banyaknya administrasi layanan keuangan yang harus disusun tidak sebanding dengan jumlah ASN	Pelayanan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
124	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan umum yang sesuai standar layanan	Resiko Operasional	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum tersedia	Pelayanan umum Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
125	Sasaran Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	Resiko Operasional	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
126	Sasaran	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah laporan	Adanya permintaan	Resiko	Belum semua komponen jasa	Pelayanan menjadi kurang	Balai Transportasi



No	Jenis Konteks Risiko	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Urusan Pemerintahan Daerah	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	tambahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Operasional	penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	maksimal	Jawa Tengah
127	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Adanya permintaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Resiko Operasional	Belum semua unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilakukan pemeliharaan	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah
128	Sasaran Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banyak sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan	Resiko Operasional	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak mencakup seluruh rute	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Balai Transportasi Jawa Tengah

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tabel 2 Analisis Risiko

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	3	3	9	Belum Ada		Belum memadai	3	3	9
Berkurangnya jumlah Angkutan umum yang beroperasi	4	3	12	Ada	Pengawasan dan pemberian sanksi	Memadai	3	3	9
Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	3	3	9	Ada	Monitoring dan evaluasi ke perusahaan yang bermasalah	Memadai	3	2	6
Terdapat Angkutan Barang Umum yang melampaui batas usia kendaraan dan belum berizin	4	2	8	Ada	Pengawasan ke perusahaan angkutan barang umum	Memadai	3	2	6
Berkurangnya jumlah armada angkutan AKDP	3	3	9	Ada	Pemberian Surat Peringatan kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan Angkutan Umum, pembinaan perusahaan angkutan umum	Memadai	3	3	9
Tarif angkutan AKDP yang dilaksanakan perusahaan angkutan umum AKDP melebihi ketentuan / aturan yang telah ditetapkan dan Penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM	3	3	9		Melakukan survey dengan cara mengikuti kendaraan angkutan umum dan wawancara kepada penumpang serta pengusaha mengenai tarif yang diberlakukan. Hasil survey kemudian dilakukan analisa dan evaluasi tarif AKDP	Memadai	2	2	4
Jaringan trayek tidak dapat ditetapkan	3	3	9	Belum ada	Koordinasi	Belum Memadai	3	3	9
Menurunnya jumlah layanan transportasi perkotaan	4	4	16	Ada	Sosialisasi	Memadai	3	4	12
terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	2	2	4	Ada	Monitoring dan evaluasi di terminal	Memadai	2	2	4
Fasilitas terminal tipe b mengalami penurunan kualitas	2	2	4	Ada	melakukan rehabilitasi terminal disesuaikan dengan prioritas	Memadai	2	2	4
Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	3	4	12		Audiensi dengan stakeholder terkait	Memadai	3	4	12
Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	3	4	12	Ada	Audiensi dengan stakeholder terkait	Memadai	3	4	12
Penurunan jumlah penumpang bus yang singgah di terminal tipe B	3	1	3	Ada	Pengarah arus bus untuk masuk ke terminal	Belum Memadai	3	1	3
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	3	3	9	Ada	Inventarisasi fasilitas yang tidak dapat digunakan	Belum Memadai	3	3	9
Menurunnya kualitas pelayanan transportasi	3	2	6	Ada	Menghimbau kepada para pengusaha AU agar meremajakan kendaraanya	Belum memadai	3	2	6
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	3	3	9	Ada	Inventarisasi fasilitas yang tidak dapat digunakan	Belum memadai	3	3	9
Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	3	4	12	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat	Belum memadai	3	3	9
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	3	3	9	ada	Inventarisasi fasilitas yang tidak dapat digunakan	Belum memadai	3	3	9
Berkurangnya jumlah Bus yang masuk terminal tipe B	3	3	9	Ada	Program Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum dan Koordinasi	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dengan Organda dan Pemangku Kebijakan terkait				
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	2	4	8	Ada	Inventarisasi fasilitas yang tidak dapat digunakan	Belum Memadai	2	4	8
Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	4	3	12	Ada	Mengingatkan kepada Organda melalui surat	Belum Memadai	4	3	12
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	3	2	6	Ada	Inventarisasi fasilitas yang tidak dapat digunakan	Belum Memadai	2	1	2
Tidak Tercapainya target keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	2	2	4	Ada	Menugaskan petugas didepan terminal untuk mengarahkan angkutan umum masuk ke terminal	Memadai	1	1	1
fasilitas terminal tidak dapat digunakan	3	3	9	Ada	Membuat skala prioritas dalam melakukan rehabilitas terminal	Belum Memadai	2	2	4
Ada beberapa kawasan strategis di perkotaan yang belum terlayani	2	5	10	Ada	Memindahkan pembukaan rute ke wilayah lain	Memadai	2	3	6
Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	4	4	16	Ada	Melakukan penggeseran TPB ke titik yang tidak terjadi penolakan	Memadai	3	3	9
Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	4	4	16	Ada	Sosialisasi pemenuhan kelaiklautan kapal untuk keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Memadai	3	3	9
Pengoperasian trayek penyeberangan tidak berijin	4	3	12	Ada	Sosialisasi penting pengajuan izin trayek penyeberangan	Memadai	3	3	9
Fasilitas pelabuhan SDP tidak terpenuhi	3	2	6	Ada	Pembangunan fasilitas pelabuhan SDP secara bertahap	Memadai	2	1	2
Terkendalanya legalitas perizinan badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, dan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4	4	16	Ada	Membuka pelayanan konsultasi dan melakukan sosialisasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Membuka pelayanan konsultasi dan melakukan sosialisasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	4	3	12
Tidak tercapainya kunjungan kapal di pelabuhan yang menyebabkan pemanfaatan/utilitas dermaga kurang optimal	3	4	12	Ada	Melakukan bimbingan teknis SOP perijinan kepelabuhanan, diklat kompetensi teknis SDM Penyelenggara Pelabuhan dan pengalokasian anggaran untuk pengelolaan pelabuhan pengumpan regional	Belum memadai	2	2	4
Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	5	3	15	Ada	1. Sosialisasi, Edukasi dan Pelatihan	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					; 2. Ramp Check dan Uji berkala kendaraan 3. Pemantauan Kondisi cuaca dan mitigasi bencana; 4. Pemasangan rambu peringatan 5. Pemenuhan Fasilitas keselamatan secara bertahap				
Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	4	3	12	Ada	Usulan Bantuan Teknis Kemenhub dan CSR	Memadai	3	3	9
Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan menurunnya tingkat pelayanan jaringan jalan (LoS dan Tundaan Lalu Lintas)	4	2	8	Ada	Pendampingan Peseta WTN	Memadai	2	1	2
rencana aksi hasil rekomendasi Forum LLAJ tidak di dukung penganggaran pada instansi terkait	3	3	9		Alternatif pembiayaan CSR	Memadai	2	3	6
Timbulnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	4	3	12	Ada	Pelaksanaan Penilaian dan Pengawasan Andalalin	Memadai	2	1	2
Perlengkapan jalan tidak dapat dipasang	2	3	6	Belum Ada			2	3	6
Meningkatnya tingkat fatalitas dan resiko di lokasi DRK	3	4	12	Ada	Pemasangan guardrail dan rambu chevron	Memadai	3	4	12
Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	3	4	12	Ada	Pemasangan rambu - rambu sementara dan berita jalan	Belum Memadai	3	4	12
Bertambahnya kejadian kecelakaan	4	3	12	Ada	Pemasangan Perlengkapan jalan DRK, Himbauan, Sosialisasi	Memadai	3	2	6
Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	4	3	12	Ada	Pemasangan Perlengkapan jalan DRK, Himbauan, Sosialisasi	Memadai	3	2	6
Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	4	4	16	Ada	Memasang perlengkapan jalan sementara	Belum memadai	4	4	16
Banyak titik DRK yang belum tertangani	4	3	12	ada	Pemasangan rambu - rambu sementara dan berita jalan	Belum memadai	3	3	9
meningkatnya kejadian kecelakaan pada DRK	2	2	4	Ada	Membuat skala prioritas dalam penanganan DRK	Belum memadai	1	1	1
belum terpenuhinya rehabilitasi DRK pada BPSPP Wilayah IV	2	2	4	Ada	Membuat skala prioritas dalam penanganan DRK	Belum memadai	1	1	1
Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	3	3	9	Ada	Kegiatan Penanganan DRK	Belum Memadai	2	2	4
Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	3	3	9	Ada	Pemasangan rambu - rambu sementara dan berita jalan	Belum Memadai	2	2	4
Meningkatnya kecelakaan di lokasi DRK sehingga tidak semua tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	2	2	4	Ada	Membuat skala prioritas dalam penanganan DRK	Belum Memadai	1	1	1
Tidak tercapainya presentasi rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	2	2	4	Ada	Membuat skala prioritas dalam penanganan DRK	Belum Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	4	3	12	Ada	Melakukan Koordinasi untuk melakukan pengawasan penerapan Standart Manajemen Keselamatan dengan BPTD Wilayah Kelas II Jateng terkait Data perusahaan karoseri yang masih aktif di Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
Menurunnya Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang lolos Uji Berkala	3	2	6	Ada	Pengawasan Kendaraan	Belum Memadai	2	2	4
Surat pemberitahuan perbaikan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	4	3	12	Ada	Pembinaan perusahaan	Belum Memadai	4	3	12
beroperasinya Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	3	3	9	Ada	Pemberian surat pemberitahuan hasil rampcheck ke perusahaan angkutan	Belum Memadai	3	3	9
Menurunnya ketertiban & kepatuhan pengusaha angkutan terkait armada	3	2	6	Ada	Diberikan himbauan & peringatan	Belum memadai	3	2	6
Menurunnya kendaraan yang berkeselamatan	3	2	6	Ada	Memperingatkan untuk diperbaiki	Belum memadai	3	2	6
tidak terlaksananya rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	3	4	12	Ada	Pembinaan perusahaan	Belum memadai	3	4	12
masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	3	4	12	Belum ada		Belum memadai	3	4	12
tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	3	2	6	Ada	Pembinaan Manajemen Perusahaan Angkutan Umum	Belum Memadai	3	2	6
Tidak Optimalnya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2	2	4	Ada	Diklat Teknis Kompetensi Audit dan Inspeksi keselamatan LLAJ	Belum Memadai	2	2	4
tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	4	4	16	Ada	Pengawasan dan pemeriksaan secara rutin	Belum Memadai	3	2	6
masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	4	4	16	Ada	Pengawasan dan pemeriksaan secara rutin	Belum Memadai	3	2	6
meningkatnya kendaraan angkutan umum yang tidak berkeselamatan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	2	2	4	Ada	Melakukan pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan administrasi	Memadai	1	1	1
Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan Teknis dan laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	2	2	4	Ada	Melakukan pengecekan fisik kendaraan dan kelengkapan administrasi	Memadai	1	1	1
Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	4	3	12	Ada	Pemeliharaan perlintasan sebidang yang sudah terpasang dan pemenuhan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang KA	Belum Memadai	4	3	12
Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	4	3	12	Ada	Pemeliharaan perlintasan sebidang yang sudah terpasang dan pemenuhan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang KA	Belum Memadai	4	3	12
kondisi Fasilitas pelabuhan SDP tidak optimal	5	3	15	Ada	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya tingkat keselamatan penyeberangan sungai	5	3	15	Ada	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Memadai	4	3	12
Kemacetan lalu lintas	2	3	6	Ada	Pengalihan rute untuk menghindari titik kemacetan pada event/kejadian tertentu dan Pemberitahuan kepada pengguna melalui sosial media dan aplikasi SIANTENG	Memadai	2	2	4
Kerusakan kendaraan saat perjalanan	4	4	16	Ada	Monitoring berkala kendaraan sebelum keberangkatan	Memadai	3	4	12
Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum	3	3	9	Ada	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial terkait pelayanan yang aman, nyaman dan memberikan kemudahan pada pembayaran dengan tarif yang terjangkau	Memadai	3	3	9
Adanya rute yang terlayani sepi peminat atau kurang ideal nilai load factor penumpangnya	3	4	12	Ada	Mengajak sekolah-sekolah yang berada pada rute Trans Jateng untuk melaksanakan kegiatan edutrip menggunakan bus Trans Jateng dan memberikan sosialisasi kepada pabrik atau kantor-kantor yang dilewati rute Trans Jateng untuk menggunakan bus Trans Jateng sebagai moda angkutan dari/menuju kantor	Memadai	3	3	9
rendahnya suplay Angkutan Umum pada masa lebaran natal tahun baru	3	3	9		Perbaikan pelayanan angkutan umum dan koordinasi dengan lintas sektoral.	Memadai	2	2	4
Berkurangnya pengguna angkutan umum dan meningkatnya pengguna kendaraan pribadi pada masa libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru	3	3	9	Ada	Perbaikan pelayanan angkutan umum dan koordinasi dengan lintas sektoral.	Memadai	2	2	4
Resiko tidak teridentifikasi	4	3	12	Ada	Pembentukan Satgas SPIP, Pengendalian Internal setiap Bulan	Memadai	3	4	12
Tingkat kinerja belum melaporkan tepat waktu	4	3	12	Ada	Penyusunan Database melalui sistem dan Pemantau sistem Controlling	Memadai	3	3	9
dokumen perencanaan dan evaluasi tidak berkualitas	4	3	12	Ada	Penyusunan Database melalui sistem dan dokumen laporan tahunan serta perhubungan dalam angka	Memadai	3	3	9
Protes masyarakat secara maif terhadap layanan perhubungan	3	3	9	Ada	Memenuhi kebutuhan minimal masyarakat serta menerima masukan masyarakat	Memadai	2	3	6
Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	3	3	9	Ada	Berkoordinasi dengan pihak terkait	Memadai	2	3	6
Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai	2	3	6		Koordinasi dengan BKD dan BPKAD	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
jadwal					serta penyediaan data dukung				
Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	3	3	9		Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	2	3	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6
Penyediaan tidak tepat waktu	3	2	6		Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	2	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	2	6	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	2	4
Menurunnya kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan	3	3	9	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 3. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	3	6
Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	3	3	9	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	3	6
Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	3	3	9	belum ada		Memadai	2	3	6
Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	3	3	9	Ada	Memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia serta melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Memadai	2	3	6
Penyediaan tidak tepat waktu	3	3	9	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	2	3	6
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	4	16	Ada	Optimalisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan kemendesakan	Memadai	3	4	12
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Memberdayakan tenaga Non ASN 2. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian	Memadai	2	1	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang lebih baik 3. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan				
Terlambatnya proses pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	perincian anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan	Memadai	3	3	9
pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian belum sesuai standar	2	2	4	Ada	Optimalisasi pelaksanaan layanan administrasi umum	Belum Memadai	1	1	1
kurang optimalnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	3	2	6	Ada	perincian anggaran sesuai pelaksanaan kegiatan	Memadai	3	3	9
Terlambatnya pembayaran upah tenaga pemungut sampah dan retribusi sampah	3	2	6	Ada	pembayaran dilakukan di DLHK kab/kota terkait	Memadai	3	2	6
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	3	3	9	Ada	Optimalisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan kemendesakan	Memadai	3	3	9
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	1	2	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan	Memadai	2	1	2
Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	2	4	Belum ada		Belum memadai	2	2	4
Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	2	3	6	Belum ada		Belum memadai	2	3	6
pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	2	2	4	Belum ada		Belum memadai	2	2	4
Penyediaan tidak tepat waktu	3	3	9	Belum ada		Belum memadai	3	3	9
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	3	12	Belum ada		Belum memadai	4	3	12
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	1. Memotivasi kepedulian pegawai terkait pengelolaan data kepegawaian yang lebih baik 2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	1	1	1
Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	1	1	1
tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	2	2	4	Ada	Melakukan pengawasan dalam layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah agar sesuai standart layanan	Memadai	1	1	1
Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	3	3	9	Ada	Memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia serta melakukan efiseinsi dan efektifitas penggunaannya	Belum Memadai	2	2	4



Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Penyediaan tidak tepat waktu	2	2	4	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	1	1	1
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	3	3	9	Ada	Optimalisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan kemendesakan	Memadai	2	2	4
masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan	Memadai	1	1	1
Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	2	2	4	Ada	Melakukan monitoring pelaksanaan setiap kegiatan supaya tidak terjadi keterlambatan	Memadai	1	1	1
tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	2	2	4		Melakukan pengawasan dalam layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah agar sesuai standart layanan	Memadai	1	1	1
pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	2	2	4	Ada	Optimalisasi pelaksanaan layanan administrasi umum	Belum Memadai	1	1	1
Penyediaan tidak tepat waktu	2	2	4	Ada	Dibentuk SK Kepala Dinas tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	Memadai	1	1	1
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	3	3	9	Ada	Optimalisasi anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan sesuai dengan kemendesakan	Belum Memadai	2	2	4
Tidak terlaksananya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	2	2	4	Ada	Melakukan pendataan agar memenuhi presentase tingkat pelayanan	Memadai	1	1	1
terdapat bangunan gedung yang kurang layak	2	2	4	Ada	Melakukan pembagian tupoksi sesuai dengan jabatan	Memadai	1	1	1
tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	2	2	4	Ada	Melakukan pengawasan dalam layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah agar sesuai standart layanan	Memadai	1	1	1
pelayanan administrasi umum perangkat daerah kurang memenuhi sesuai standar layanan	2	2	4	Ada	Melakukan pengawasan layanan administrasi umum perangkat daerah agar terpantau dan tepat waktu	Memadai	1	1	1
Tidak kesesuaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kebutuhan	2	2	4	Ada	Melakukan pemantauan dan pengawasan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Memadai	1	1	1
Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	3	3	9	Ada	Melakukan skala prioritas dalam melakukan rehabilitasi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Belum Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada			Skala/Nilai Risiko Residu setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Menurunnya tingkat pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah	3	3	9	Ada	Melakukan penyediaan sesuai prioritas dengan melihat keterdesakan	Memadai	3	3	9
Menurunnya tingkat administrasi layanan keuangan	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Menurunnya tingkat pelayanan umum yang sesuai standar layanan	3	3	9	Ada	Melakukan penyediaan sesuai prioritas dengan melihat keterdesakan	Memadai	3	3	9
Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	3	2	6	Belum Ada	-	Pelayanan kepegawaian Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	3	2	6
Adanya permintaan tambahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	1	2	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	1	2
Adanya permintaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	3	3	9	Ada	Melakukan pemeliharaan sesuai prioritas	Memadai	3	3	9
Banyak sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan	3	4	12	Ada	Melakukan pemeliharaan sesuai prioritas	Memadai	3	4	12

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023

Tabel 3 Risiko Prioritas

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
22	9	Kepala Dinas Perhubungan	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa
22	9	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Melampaui batas usia, dampak covid	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat
49	6	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dampak covid, menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak berizin
49	6	Kepala Bidang Angkutan Jalan	PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS
22	9	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Usia armada AKDP melebihi batas 25 tahun	Pengusaha tidak mampu meremajakan armada
76	4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Tidak adanya kepatuhan perusahaan angkutan umum dan belum optimalnya evaluasi terhadap kenaikan komponen tarif dan load factor angkutan AKDP yang rata - rata < 50 %	Masyarakat semakin tidak berminat untuk menggunakan angkutan umum karena lebih mahal dan tidak fleksibel
22	9	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Kendaraan Plat hitam tidak mau berubah menjadi plat kuning	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi
2	12	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Penolakan dari pengusaha angkutan umum di koridor tersebut	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat
76	4	Kepala Bidang Jatranska	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal
76	4	Kepala Bidang Jatranska	1. keterbatasan anggaran;	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
2	12	Kepala Bidang Jatranska	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai
2	12	Kepala Bidang Jatranska	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai
98	3	Kepala BPSPP Wilayah I	1. Enggannya masyarakat menggunakan fasilitas terminal 2. Lokasi Tterminal tidak strategis	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi
22	9	Kepala BPSPP Wilayah I	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa
49	6	Kepala BPSPP Wilayah II	Usia kendaraan AKDP sudah banyak yang mencapai usia batas maksimal yaitu 25 th dan banyak yang tidak mampu meremajakan	Kendaraan yang melayani transportasi yang berijin menurun dalam artian yang berkeselamatan & AU akan ditinggalkan masyarakat
22	9	Kepala BPSPP Wilayah II	Keterbatasan anggaran	Tingkat kepuasan masyarakat menurun
22	9	Kepala BPSPP Wilayah III	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani
22	9	Kepala BPSPP Wilayah III	Keterbatasan Anggaran	Terminal yang tidak sesuai SPM
22	9	Kepala BPSPP Wilayah IV	Tidak beroperasi nya Bus dikarenakan berkurangnya minat penumpang angkutan umum serta kemampuan perusahaan dalam biaya operasional	Masyarakat / Calon Penumpang di terminal tidak terlayani
48	8	Kepala BPSPP Wilayah IV	Kurang Tersedianya Anggaran Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal	Kurang Maksimalnya Pelayanan Terminal
2	12	Kepala BPSPP Wilayah V	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani
100	2	Kepala BPSPP Wilayah V	Keterbatasan Anggaran	Terminal yang tidak sesuai SPM
107	1	Kepala BPSPP Wilayah VI	Ketidaktaatan perusahaan angkutan umum untuk memasuki terminal	Keterhamabatan pergerakan orang dan barang

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
76	4	Kepala BPSPP Wilayah VI	Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan rehabilitas terminal	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat penggunaan angkutan umum dan operator angkutan umum
49	6	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	Keterbatasan kemampuan anggaran daerah	Tidak terlayani pembukaan rute di wilayah tersebut
22	9	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah - Kepala Seksi Sarana Prasarana	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya TPB	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan
22	9	Bidang Pelayaran	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi
22	9	Bidang Pelayaran	Pemilik/operator kapal tidak melakukan ijin trayek	Dokumen persyaratan ijin trayek tidak terpenuhi
100	2	Bidang Pelayaran	Fasilitas Palabuhan SDP yang tersedia tidak memadai	Kenyamanan penggunaan angkutan SDP tidak terpenuhi
2	12	Bidang Pelayaran	pelaku usaha masih banyak yang belum paham tentang prosedur dalam pengajuan izin usaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan masih belum sempurnanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sampai dengan saat ini sering dilakukan perubahan/perkembangan	Terdapat pelaku usaha yang belum berizin namun sudah menjalankan kegiatan usahanya dan masih terdapat pelaku usaha yang belum menyesuaikan perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)
76	4	Bidang Pelayaran	Dermaga belum siap operasi karena ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi, kompetensi SDM Penyelenggara Pelabuhan belum memadai dan kurangnya anggaran pengelolaan pelabuhan.	Terganggunya mobilitas penumpang kapal dan distribusi barang dari dan ke pelabuhan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.
2	12	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ; 5. Fasilitas keselamatan	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas
22	9	Kepala Bidang Lalu lintas Jalan	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan
100	2	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Terjadinya kecelakaan akibat kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan kurangnya disiplin berlalu lintas
49	6	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	masing - masing instansi memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran tersendiri	tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan
100	2	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Pembangun/pengembang dari pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur tidak menyusun analisis dampak lalu lintas sebagai langkah mitigasi terhadap dampak	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur
49	6	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	tidak tersedianya ruang milik jalan	kebutuhan Perlengkapan jalan tidak dapat dipenuhi
2	12	Kepala BPSPP Wilayah I	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan DRK tidak terpasang	Fatalitas dan Resiko Kecelakaan Tinggi
2	12	Kepala BPSPP Wilayah I - Kepala Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan SDM serta fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal
49	6	Kepala BPSPP Wilayah II	Faktor human error, sarana prasarana, fasilitas perlengkapan jalan dan cuaca	Kejadian kecelakaan
49	6	Kepala BPSPP Wilayah II - Kepala Seksi Lalu	Keterbatasan anggaran, sehingga skala prioritas	Potensi rawan kecelakaan, ramai aduan masyarakat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
		Lintas		
1	16	Kepala BPSPP Wilayah III	Keterbatasan Anggaran	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan
22	12	Kepala BPSPP Wilayah III - Kepala Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan Anggaran	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan
107	1	Kepala BPSPP Wilayah IV	banyaknya kejadian kecelakaan di DRK	Menurunnya keselamatan pengguna jalan pada DRK
107	1	Kepala BPSPP Wilayah IV - Kepala Seksi Lalu Lintas	Banyaknya lokasi DRK yang perlu ditangani pada BPSPP Wilayah IV	Menurunnya keselamatan pengguna jalan dikarenakan belum tertanganinya DRK pada BPSPP Wilayah IV
76	4	Kepala BPSPP Wilayah V	Keterbatasan Anggaran	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan
76	4	Kepala BPSPP Wilayah V - Kepala Seksi Lalu Lintas	Keterbatasan Anggaran	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan
107	1	Kepala BPSPP Wilayah VI	Banyaknya kecelakaan yang terjadi sehingga tidak semuanya data ditangani	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK
107	1	Kepala BPSPP Wilayah VI - Kepala Seksi Lalu Lintas	Banyaknya DRK yang harus ditangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK
49	6	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Keterbatasan Informasi terkait perusahaan Karoseri di Jawa Tengah yang masih beroperasi	Tidak tercapainya target indikator kinerja organisasi
76	4	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan
2	12	Kepala BPSPP Wilayah I	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi
22	9	Kepala BPSPP Wilayah I - Kepala Seksi Angkutan	Usia Kendaraan yang beroperasi diatas peraturan perundang-undangan yang berlaku	Fasilitas Kendaraan kurang layak
49	6	Kepala BPSPP Wilayah II	Kurangnya pengawasan dilapangan	Kendaraan tidak berkeselamatan
49	6	Kepala BPSPP Wilayah II - Kepala Seksi Angkutan	Pengusaha kurang perhatian terhadap perawatan kendaraan	Kendaraanya tidak nyaman & tidak berkeselamatan
2	12	Kepala BPSPP Wilayah III	Keterbatasan Anggaran	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar
2	12	Kepala BPSPP Wilayah III -Kepala Seksi Angkutan	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar
49	6	Kepala BPSPP Wilayah IV	Kurangnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Rekomendasi Rampcheck	Kendaraan yang Laik Jalan dan Tidak Sesuai SPM
76	4	Kepala BPSPP Wilayah IV -Kepala Seksi Angkutan	Kurangnya Kompetensi SDM Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Serta kepatuhan Pelaksanaan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Tidak Maksimalnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ
49	6	Kepala BPSPP Wilayah V	Keterbatasan Anggaran	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar
49	6	Kepala BPSPP Wilayah V -Kepala Seksi Angkutan	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar
107	1	Kepala BPSPP Wilayah VI	Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Angkutan umum pada Terminail Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
107	1	Kepala BPSPP Wilayah VI - Kepala Seksi Angkutan	Kurangnya Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS pada Terminail Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
2	12	Kepala Bidang Jatranska	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA
2	12	Kepala Bidang Jatranska	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA
2	12	Kepala Bidang Pelayaran	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi
2	12	Kepala Bidang Pelayaran	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi
76	4	Kepala Dinas Perhubungan	Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana)	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
2	12	Kepala Dinas Perhubungan	Belum optimalnya perawatan kendaraan	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat
22	9	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantar sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi	Kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan
22	9	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah-Kepala Seksi Operasional	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit
76	4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Rendahnya jumlah Angkutan Umum yang laik jalan/operasi	Tingginya Jumlah Penumpang tidak terangkut
76	4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya jalan tol yang memudahkan menggunakan kendaraan pribadi serta naiknya harga tiket angkutan umum pada saat momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru	berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum, terjadi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada ruas - ruas jalan sekitar lokasi wisata
2	12	Sekretaris	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data
22	9	Sekretaris	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data
22	9	Sekretaris	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data
49	6	Sekretaris	Sumber daya dinas perhubungan terbatas	Pelayanan tidak maksimal
49	6	Sekretaris	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menggau pelayanan masyarakat
98	3	Sekretaris	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal
49	6	Sekretaris	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan
76	4	Sekretaris	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal
49	6	Sekretaris	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
76	4	Sekretaris	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
76	4	Sekretaris	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
76	4	Sekretaris	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat
49	6	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. Dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
				pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan,
49	6	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran
49	6	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pengelolaan dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan
49	6	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas
49	6	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan sesuai dengan Perda terkait Retribusi pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
2	12	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	Pada saat pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan harga dibandingkan pada saat penyusunan anggaran.	Pemeliharaan dilakukan sesuai dengan prioritas kerusakannya, yang lebih didahulukan adalah pemeliharaan yang sudah sangat parah kerusakannya.
100	2	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP
22	9	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	Pengumpulan berkas SPJ kadang kurang sama kecepatannya antara seksi satu dengan yang lainnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan	Pembiayaan pelaksanaan kegiatan agak terganggu pelaksanaannya
107	1	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	kurangnya SDM dan minimnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum
22	9	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	kurangnya sumber daya penunjang kegiatan	sumber daya penunjang tidak tercukupi
49	6	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	Pembayaran harus dilakukan secara manual di DLH kabupaten/kota tempat terminal tipe B	Anggaran jasa pelayanan umum kantor terserap tidak tepat waktu
22	9	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	Terjadinya kenaikan harga sehingga satuan harga bangunan mengalami peningkatan harga; dan kebutuhan diluar perencanaan	Ada beberapa kerusakan gedung serta sarana dan prasaranan yang tidak diperbaiki
100	2	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP
76	4	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	keterbatasan jumlah SDM	kurang akuratnya pelaporan
49	6	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	kurangnya SDM pengelola yang mumpuni	terhambatnya layanan administrasi kepegawaian
76	4	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum
22	9	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan
2	12	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan
107	1	Kepala BPSPP IV - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP
107	1	Kepala BPSPP IV - Kepala Sub Bag TU	keterbatasan jumlah SDM	kurang akuratnya pelaporan
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	kurangnya SDM dan minimnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum
76	4	Kepala BPSPP IV - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	peralatan dan perlengkapan kantor yang terbatas sehingga tidak bisa menunjang kegiatan dinas secara optimal

<b>Risiko Prioritas</b>	<b>Skala Risiko</b>	<b>Pemilik Risiko</b>	<b>Sebab</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
107	1	Kepala BPSPP IV - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan
76	4	Kepala BPSPP IV - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	kondisi gedung yang sudah tidak layak, mengurangi estetika dan kenyamanan serta keselamatan pegawai dan pengunjung
107	1	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP
107	1	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	keterbatasan jumlah SDM	kurang akuratnya pelaporan
107	1	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
107	1	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum
107	1	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan
76	4	Kepala BPSPP V - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan Anggaran	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, mengurangi estetika dan kenyamanan serta keselamatan pegawai dan pengunjung	Kurangnya pendataan guna pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	Banyaknya jumlah dokumen yang tersedia guna memenuhi administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kurangnya inventarisasi dokumen yang tersedia sehingga tidak dapat memenuhi administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah
107	1	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	Kerjasama di lingkungan kantor yang kurang memenuhi target pencapaian	Keterlambatan dalam penyediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun
76	4	Kepala BPSPP VI - Kepala Sub Bag TU	Keterbatasan anggaran dan banyaknya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang perlu dilakukan pemeliharaan	Kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
22	9	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan tersedia	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal
49	6	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Banyaknya administrasi layanan keuangan yang harus disusun tidak sebanding dengan jumlah ASN	Pelayanan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal
22	9	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum tersedia	Pelayanan umum Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal
49	6	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal
100	2	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Belum semua komponen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Pelayanan menjadi kurang maksimal
22	9	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Belum semua unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilakukan pemeliharaan	Pelayanan menjadi kurang maksimal
2	12	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak mencakup seluruh rute	Pelayanan menjadi kurang maksimal

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023



Tabel 4 Rencana Tindak Pengendalian

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Provinsi	berkurangnya layanan pada jaringan trayek AKDP	9	Ketidakmampuan pengusaha transportasi untuk menyediakan layanan angkutan sesuai ekspektasi masyarakat (ekonomi)	Terhambatnya distribusi orang, barang dan jasa	Evaluasi Jaringan Trayek dan Tarif	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Berkurangnya jumlah Angkutan umum yang beroperasi	9	Melampaui batas usia kendaraan, dampak covid	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat	Mendorong pengusaha angkutan umum melakukan perpanjangan ijin trayek sesuai aturan, Menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang, Gerakan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat, evaluasi trayek angkutan umum.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan taksi terpenuhi	Terdapat Angkutan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang melampaui batas usia kendaraan	6	Dampak covid, menyebabkan perusahaan belum bisa melakukan peremajaan	Terdapat kendaraan Taksi (Taksi, AJDP,ASK) yang tidak berizin			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio angkutan barang yang berijin	Terdapat Angkutan Barang Umum yang melampaui batas usia kendaraan dan belum berizin	6	PP 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko	Terdapat kendaraan Angkutan Barang Umum yang belum terverifikasi di OSS			
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Angkutan Orang Dalam Trayek yang berijin	Berkurangnya jumlah armada angkutan AKDP	9	Usia armada AKDP melebihi batas 25 tahun	Pengusaha tidak mampu meremajakan armada	Mendorong pengusaha angkutan umum melakukan perpanjangan ijin trayek sesuai aturan, Menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang, Gerakan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat, evaluasi trayek angkutan umum.	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penetapan Tarif Kelas	Rasio Trayek yang	Tarif angkutan AKDP	4	Tidak adanya kepatuhan	Masyarakat semakin tidak			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Ditetapkan Pemutakhiran Tarif	yang dilaksanakan perusahaan angkutan umum AKDP melebihi ketentuan / aturan yang telah ditetapkan dan Penetapan Kebijakan kenaikan harga BBM		perusahaan angkutan umum dan belum optimalnya evaluasi terhadap kenaikan komponen tarif dan load factor angkutan AKDP yang rata - rata < 50 %	berminat untuk menggunakan angkutan umum karena lebih mahal dan tidak fleksibel			
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio jaringan trayek pedesaan antar kabupaten kota dalam provinsi yang ditetapkan	Jaringan trayek tidak dapat ditetapkan	9	Kendaraan Plat hitam tidak mau berubah menjadi plat kuning	Masyarakat pedesaan tidak mendapatkan pelayanan transportasi	Monitoring angkutan pedesaan	Kepala Bidang Angkutan Jalan	12 bulan setiap tahun
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Kawasan perkotaan yang memiliki rencana layanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya jumlah layanan transportasi perkotaan	8	Penolakan dari pengusaha angkutan umum di koridor tersebut	Biaya pengeluaran transportasi masyarakat meningkat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Pemanfaatan Terminal	terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan terminal	4	Penyewa aset melakukan perubahan sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya	Mengganggu kegiatan operasional terminal			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio terminal Tipe B dalam kondisi baik	Fasilitas terminal tipe b mengalami penurunan kualitas	4	penyerahan aset terminal dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi dalam kondisi kurang memadai	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	12	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	monitoring kemajuan progress penyerahan aset terminal tipe b yang belum menjadi milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Kepala Bidang Jatraska	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Rasio Implementasi Dokumen RIJLLAJ	Kurangnya jumlah simpul dan jaringan yang dibangun	12	Proses Penyerahan aset yang belum selesai	Masyarakat tidak mendapat layanan simpul transportasi yang memadai	monitoring kemajuan progress penyerahan aset terminal tipe b yang belum menjadi milik pemerintah Provinsi	Kepala Bidang Jatraska	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Jawa Tengah		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Penurunan jumlah penumpang bus yang singgah di terminal tipe B	3	1. Enggan nya masyarakat menggunakan fasilitas terminal 2. Lokasi Tterminal tidak strategis	Tidak berfungsinya fungsi terminal sebagai simpul transportasi			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Rasio rehabilitasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Perencanaan dan penganggaran rehabilitasi dan pemeliharaan berdasarkan inventarisasi kerusakan fasilitas terminal	Kepala BPSPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurun nya kualitas pelayanan transportasi	6	Usia kendaraan AKDP sudah banyak yang mencapai usia batas maksimal yaitu 25 th dan banyak yang tidak mampu meremajakan	Kendaraan yang melayani transportasi yang berijin menurun dalam artian yang berkeselamatan & AU akan ditinggalkan masyarakat			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Mendata & melaporkan kebutuhan perawatan dan perbaikan	Kepala BPSPP Wilayah II	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus Balai pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	9	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	Evaluasi penyelenggaraan ter,omal	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	9	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Berkurangnya jumlah Bus yang masuk terminal tipe B	9	Tidak beroperasi nya Bus dikarenakan berkurangnya minat penumpang angkutan umu serta kemampuan perusahaan dalam biaya operasional	Masyarakat / Calon Penumpang di terminal tidak terlayani	Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Tipe B	Kepala BPSPP Wilayah IV	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	8	Kondsi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IV Kelas A							
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Masih adanya Bus yang tidak masuk terminal tipe B	12	Operasional Bus yang tidak maksimal dikarenakan minat penumpang serta kemampuan perusahaan dalam melayani	Masyarakat / Calon Penumpang tidak terlayani	Evaluasi penyelenggaraan terminal	Kepala BPSPP Wilayah V	12 bulan setiap tahun
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	2	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Dapat mencelakai fisik masyarakat pengguna terminal bahkan membahayakan nyawa			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Keterisian Bus pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak Tercapainya target keterisian bus pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	1	Ketidaktaatan perusahaan angkutan umum untuk memasuki terminal	Keterhamabatan pergerakan orang dan barang			
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Presentase rehabilitaasi terminal Tipe B pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	fasilitas terminal tidak dapat digunakan	4	Kondisi fasilitas yang membahayakan masyarakat pengguna terminal	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat penggunaan angkutan umum dan operator angkutan umum			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Konektivitas Perkotaan	Ada beberapa kawasan strategis di perkotaan yang belum terlayani	6	Keterbatasan kemampuan anggaran daerah	Tidak terlayani pembukaan rute di wilayah tersebut			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio Jumlah Tempat Perhentian Bus (TPB) Terpenuhi	Spesifikasi teknis yang sesuai DED tidak sesuai kondisi lapangan akibat penolakan	9	Terjadi penolakan dari masyarakat karena merasa terganggu adanya TPB	Terjadi perbedaan dalam DED dengan kondisi di lapangan	Sosialisasi/pendekatan dengan masyarakat bersama aparat setempat terkait lahan halte yang menggunakan bahu jalan (kepemilikan pemerintah)	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah - Kepala Seksi Sarana Prasarana	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Menurunnya tingkat Keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	9	Transportasi laut dan ASDP tidak memenuhi kelaiklautan kapal	Jaminan keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP tidak terpenuhi	Sosialisasi pemenuhan kelaiklautan kapal untuk keamanan dan keselamatan transportasi laut dan ASDP	Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek	Rasio dokumen terlengkap sebagai persyaratan ijin trayek berdasarakan	Pengoperasian trayek penyeberangan tidak berijin	9	Pemilik/operator kapal tidak melakukan ijin trayek	Dokumen persyaratan ijin trayek tidak terpenuhi	Sosialisasi pentingnya pengajuan ijin trayek penyeberangan	Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	tingkatannya							
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rasio Fasilitas Pelabuhan SDP terpenuhi	Fasilitas pelabuhan SDP tidak terpenuhi	2	Fasilitas Pelabuhan SDP yang tersedia tidak memadai	Kenyamanan penggunaan angkutan SDP tidak terpenuhi			
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Rasio perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	Terkendalanya legalitas perizinan badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat, dan usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	pelaku usaha masih banyak yang belum paham tentang prosedur dalam pengajuan izin usaha melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan masih belum sempurnanya Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sampai dengan saat ini sering dilakukan perubahan/perkembangan	Terdapat pelaku usaha yang belum berizin namun sudah menjalankan kegiatan usahanya dan masih terdapat pelaku usaha yang belum menyesuaikan perizinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu perizinan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)	Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha yang perizinannya belum menyesuaikan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dengan pendampingan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Bidang Pelayaran	1 tahun
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Berth occupancy ratio	Tidak tercapainya kunjungan kapal di pelabuhan yang menyebabkan pemanfaatan/utilitas dermaga kurang optimal	4	Dermaga belum siap operasi karena ada beberapa perizinan yang harus dilengkapi, kompetensi SDM Penyelenggara Pelabuhan belum memadai dan kurangnya anggaran pengelolaan pelabuhan.	Terganggunya mobilitas penumpang kapal dan distribusi barang dari dan ke pelabuhan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.			
Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dalam 1 Juta Keberangkatan	Meningkatnya frekuensi Kecelakaan Transportasi	12	1. Human Error ; 2. Ketidak laikan kendaraan; 3. Cuaca/ bencana; 4. Kondisi Medan ;	Adanya korban , kerugian material dan kemacetan lalu lintas	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk kecepatan respon	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5. Fasilitas keselamatan		penanganan, Sosialisasi call center fasilitas kesehatan, Sosialisasi pertolongan pertama terhadap penanganan kecelakaan		
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Ruas jalan belum terpenuhi kebutuhan minimalnya	9	jumlah pemasangan fasilitas perlengkapan jalan tidak sesuai target	tidak tercapainya target pemasangan perlengkapan jalan	Koodinasi kepada pemangku kepentingan dan Kementerian Perhubungan (Usulan Bantuan Teknis)	Kepala Bidang Lalu lintas Jalan	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi penilaian pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Provinsi Jateng	Kurangnya ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan menurunnya tingkat pelayanan jaringan jalan (LoS dan Tundaan Lalu Lintas)	2	Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berpartisipasi dalam penilaian lomba tertib lalu lintas Wahana Tata Nugraha	Terjadinya kecelakaan akibat kurangnya fasilitas keselamatan transportasi dan kurangnya disiplin berlalu lintas			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi hasil forum LLAJ	rencana aksi hasil rekomendasi Forum LLAJ tidak di dukung penganggaran pada instansi terkait	6	masing - masing instansi memiliki dokumen perencanaan dan penganggaran tersendiri	tidak tertanganinya Daerah Rawan Kecelakaan			
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalalin di Jalan Provinsi	Timbulnya gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas	2	Pembangun/pengembang dari pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur tidak menyusun analisis dampak lalu lintas sebagai langkah mitigasi terhadap dampak	Timbulnya kemacetan lalu lintas akibat pembangunan/pengembangan pusat kegiatan/permukiman/infrastruktur			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanProvinsi	Rasio pemenuhan perlengkapan jalan	Perlengkapan jalan tidak dapat dipasang	6	tidak tersedianya ruang milik jalan	kebutuhan Perlengkapan jalan tidak dapat dipenuhi			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Meningkatnya tingkat fatalitas dan resiko di lokasi DRK	12	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Bertambahnya korban kecelakaan dengan tingkat Fatalitas tinggi	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	12	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK	Koordinasi dengan pihak terkait sebagai bentuk pengendalian Risiko	Kepala BPSPP Wilayah I - Kepala Seksi Lalu Lintas	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Bertambahnya kejadian kecelakaan	6	Faktor human error, sarana prasarana, fasilitas perlengkapan jalan dan cuaca	meningkatnya tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	6	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	16	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Memastikan fasilitas perlengkapan jalan tetap berfungsi sebagaimana mestinya	Kepala BPSPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Banyak titik DRK yang belum tertangani	9	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP Wilayah III - Kepala Seksi Lalu Lintas	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	meningkatnya kejadian kecelakaan pada DRK	1	banyaknya kejadian kecelakaan di DRK	Menurunnya keselamatan pengguna jalan pada DRK			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	belum terpenuhinya rehabilitasi DRK pada BPSPP Wilayah IV	1	Banyaknya lokasi DRK yang perlu ditangani pada BPSPP Wilayah IV	Menurunnya keselamatan pengguna jalan dikarenakan belum tertanganinya DRK pada BPSPP Wilayah IV			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V	Masih terdapat kecelakaan lalu lintas yang ada di ruas jalan provinsi yang belum termitigasi	4	Fasilitas Perlengkapan Jalan Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan belum optimal	Meningkatnya jumlah fatalitas kecelakaan			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kelas B							
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	Fasilitas Keselamatan untuk DRK tidak Maksimal	4	Keterbatasan fasilitas pendukung untuk Rehabilitasi DRK	Meningkatnya tingkat fatalitas DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya kecelakaan di lokasi DRK sehingga tidak semua tertangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	1	Banyaknya kecelakaan yang terjadi sehingga tidak semuanya data ditangani	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK			
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Rasio rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Tidak tercapainya presentasi rehabilitasi DRK pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	1	Banyaknya DRK yang harus ditangani pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Wilayah VI	Menurunnya tingkat keselamatan pada DRK			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Banyaknya perusahaan karoseri yang belum menerapkan Standart Manajemen Keselamatan	6	Belum terinfonya peraturan terbaru tentang Standart Manajemen Keselamatan	Peningkatan kecelakaan disebabkan karena kendaraan tidak memenuhi standart laik jalan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan bermotor wajib uji yang lulus uji berkala di Jawa Tengah	Menurunnya Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang lolos Uji Berkala	4	Kendaraan tidak sesuai Spesifikasi teknis (dimensi dan kelaikan kendaraan)	terjadi kecelakaan lalu lintas akibat overdimensi dan tidak laik jalan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Surat pemberitahuan perbaikan tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan	12	Perusahaan tidak memperhatikan surat pemberitahuan karena faktor ekonomi	Tidak ada perbaikan dari pihak perusahaan terhadap kendaraan yang beroperasi	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPPP Wilayah I	12 bulan setiap tahun
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	beroperasinya Kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis	9	Usia Kendaraan yang beroperasi diatas peraturan perundang-undangan yang berlaku	Meningkatnya angka kecelakaan akibat kendaraan tidak laik	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPPP Wilayah I - Kepala Seksi Angkutan	12 bulan setiap tahun



Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya ketertiban & kepatuhan pengusaha angkutan terkait armada	6	Kurangnya pengawasan dilapangan	Meningkatnya kecelakaan lalu lintas akibat Kendaraan tidak berkeselamatan			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	Menurunnya kendaraan yang berkeselamatan	6	Pengusaha kurang perhatian terhadap perawatan kendaraan	Kendaraanya tidak nyaman & tidak berkeselamatan			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	tidak terlaksananya rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	12	Perusahaan mengabaikan surat pemberitahuan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	Pembinaan kepada pemilik perusahaan dan pemilik kendaraan pada koperasi	Kepala BPSPPP Wilayah III	12 bulan setiap tahun
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	12	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar	Penetapan Sanksi yang lebih Massif sesuai dengan regulasi	Kepala BPSPPP Wilayah III - Kepala Seksi Angkutan	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	tidak ditindaklanjuti rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus	6	Kurangnya Kepatuhan Perusahaan terhadap Rekomendasi Rampcheck	Kendaraan yang Laik Jalan dan Tidak Sesuai SPM			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Tidak Optimalnya Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	4	Kurangnya Kompetensi SDM Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Serta kepatuhan Pelaksanaan Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan	Tidak Maksimalnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ			
PROGRAM	Rasio Hasil	tidak ditindaklanjuti	6	Perusahaan mengabaikan surat	terjadinya kecelakaan akibat			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	rekomendasi rampcheck oleh perusahaan bus		pemberitahuan	sarana jalan yang tidak standar			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	masih adanya kendaraan yang tidak laik jalan	6	kurangnya kepatuhan	terjadinya kecelakaan akibat sarana jalan yang tidak standar			
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	meningkatnya kendaraan angkutan umum yang tidak berkeselamatan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	1	Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Angkutan umum pada Terminal Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Kendaraan yang dilakukan ramp check pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan Teknis dan laik Jalan pada Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	1	Kurangnya Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS pada Terminal Tipe B Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Kurang Terjaminnya keselamatan Penumpang Angkutan Umum pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A			
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Rasio perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	12	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Memasukkan ke dalam dokumen Renstra Dinas	Kepala Bidang Jatranska	12 bulan setiap tahun
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Rasio realisasi rencana induk perkeretaapian	Kurang optimalnya keselamatan di perlintasan sebidang KA	12	Alih status ruas jalan	Tidak tersedianya fasilitas keselamatan perlintasan KA	Memasukkan ke dalam dokumen Renstra Dinas	Kepala Bidang Jatranska	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio pemenuhan Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	kondisi Fasilitas pelabuhan SDP tidak optimal	12	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Kepala Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang	Rasio Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Menurunnya tingkat keselamatan penyeberangan	12	Fasilitas keselamatan penyeberangan sungai yang tersedia tidak memadai	Keamanan dan keselamatan penyeberangan sungai tidak terpenuhi	Pemenuhan fasilitas keselamatan penyeberangan sungai	Kepala Bidang Pelayaran	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	terpenuhi	sungai						
Meningkatnya Kualitas Layanan Angkutan Umum	On Time Performance Layanan Transportasi	Kemacetan lalu lintas	4	Ada kejadian tertentu di rute angkutan umum (Kecelakaan lalu lintas, event, bencana)	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat		Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
0	0	Kerusakan kendaraan saat perjalanan	12	Belum optimalnya perawatan kendaraan	Menurunnya tingkat kepuasan masyarakat	Monitoring berkala Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan (Penerapan Check Point Kendaraan)	Kepala Dinas Perhubungan	12 Bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perpindahan moda angkutan umum	Kurangnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum	9	Penumpang masih memilih angkutan yang bisa menjemput dan mengantarkan sampai lokasi tujuan atau tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi	Kepadatan lalu lintas yang menyebabkan kemacetan	Memperbaiki pelayanan angkutan umum dan memberikan kemudahan penumpang dalam melakukan pembayaran	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah	12 bulan setiap tahun
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang terlayani angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan	Adanya rute yang terlayani sepi peminat atau kurang ideal nilai load factor penumpangnya	9	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte atau TPB yang kurang ideal, atau rute yang dilalui memang bukan wilayah yang padat atau ramai dengan penumpang	Layanan menjadi kurang efektif dan bermanfaat karena jumlah penumpang yang sedikit	Melakukan sosialisasi langsung terhadap masyarakat terhadap rute baru, lokasi halte dan membangun TPB yang potensial banyak calon penumpang	Kepala Balai Transportasi Jawa Tengah- Kepala Seksi Operasional	12 bulan setiap tahun
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	rendahnya suplay Angkutan Umum pada masa lebaran natal tahun baru	4	Rendahnya jumlah Angkutan Umum yang laik jalan/operasi	Tingginya Jumlah Penumpang tidak terangkut			
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani	Berkurangnya pengguna angkutan umum dan meningkatnya pengguna kendaraan pribadi pada masa libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru	4	Tingginya kepemilikan kendaraan pribadi dan adanya jalan tol yang memudahkan menggunakan kendaraan pribadi serta naiknya harga tiket angkutan umum pada saat momen Lebaran, Natal dan Tahun Baru	berkurangnya jumlah penumpang angkutan umum karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum, terjadi rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, terutama pada ruas - ruas jalan sekitar lokasi wisata			
Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko	Resiko tidak teridentifikasi	12	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data	monitoring dan evaluasi secara berkala KAK pelaksanaan kegiatan dengan aplikasi Pake Siska	Sekretaris	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Tingkat kinerja belum melaporkan tepat waktu	9	belum adanya sistem pelaporan data yang memadai	dokumen yang tersusun belum bisa dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber data	Desk evaluasi capain kinerja dan output melaksanakan kegiatan	Sekretaris	12 bulan setiap tahun
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	dokumen perencanaan dan evaluasi tidak berkualitas	9	tidak memiliki data dukung dan data teknis yang memadai	dokumen yang tersusun tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber data	Desk evaluasi capain kinerja dan output melaksanakan kegiatan	Sekretaris	4 bulan
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Protes masyarakat secara maif terhadap layanan perhubungan	6	Sumber daya dinas perhubungan terbatas	Pelayanan tidak maksimal			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Sekretariat)	Pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah tidak efektif dan efisien	6	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Kegiatan perkantoran tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menggau pelayanan masyarakat			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal	3	Dokumen dan data dukung belum tersedia	Admnistrasi Keuangan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Proses klaim Asuransi sulit dilakukan	6	Data dukung Klaim asuransi tidak lengkap	Klaim asuransi tidak dapat dilakukan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Pelaksanaan Kegiatan tidak terjadwal	4	Jadwal pelaksanaan kegiatan tidak dibuat sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	Kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	4	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah unit barang	Penyediaan tidak	4	Belum dibentuk penanggung jawab	Penyediaan terlambat			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	tepat waktu		kegiatan				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A)	Menurunnya kualitas layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan	6	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pada Balai Pengelola Sarana Pasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. Dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan,			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	6	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	6	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	12	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparaturn pemerintahan	Melaksanakan pemeliharaan sesuai skala prioritas kerusakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran untuk melakukan pemeliharaan atas	Kepala BPSPP I - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						gedung dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarana kantor lainnya.		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM	Pelaksanaan layanan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan kurang cepat penyelesaiannya. dari sisi administrasi kepegawaian masih harus ditingkatkan pengelolaan data kepegawaiannya, sisi administrasi keuangan penyelesaian SPJ pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terlambatnya proses pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan	9	Pengumpulan berkas SPJ kadang kurang sama kecepatannya antara seksi satu dengan yang lainnya setelah kegiatan selesai dilaksanakan	Pembiayaan pelaksanaan kegiatan agak terganggu pelaksanaannya	Merencanakan kegiatan sesuai dengan target di RKO	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian belum sesuai standar	1	kurangnya SDM dan minimnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	kurang optimalnya pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	9	kurangnya sumber daya penunjang kegiatan	sumber daya penunjang tidak tercukupi	Merencanakan kegiatan sesuai dengan target di RKO	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Terlambatnya pembayaran upah tenaga pemungut sampah dan retribusi sampah	6	Pembayaran harus dilakukan secara manual di DLH kabupaten/kota tempat terminal tipe B	Anggaran jasa pelayanan umum kantor terserap tidak tepat waktu			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	9	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	melakukan pengawasan saat pengerjaan proyek	Kepala BPSPP II - Kepala Sub Bag TU	1 Tahun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	2	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Perhubungan Wilayah III Kelas A)							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	kurang akuratnya pelaporan			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	kurangnya SDM pengelola yang mumpuni	terhambatnya layanan administrasi kepegawaian			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	4	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	9	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	12	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan	Usulan Anggaran	Kepala BPSPP III - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dengan standar layanan	layanan administrasi kepegawaian						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dibutuhkan masih lebih banyak dari yang tersedia	4	Adanya perubahan harga pada saat pelaksanaan kegiatan	Paket belanja administrasi umum yang disediakan terbatas			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Penyediaan tidak tepat waktu	1	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B)	masih belum terpenuhi kebutuhan tingkat pelayanan umum dan keuangan	1	kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai	pelaksanaan pelayanan umum dan keuangan yang tidak sesuai SOP			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Keterlambatan Penyusunan dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Pelaksanaan kegiatan kadang berjalan tidak sesuai dengan jadwal waktu yang sudah direncanakan sehingga terjadi perubahan penyerapan anggaran yang tersedia	Terjadi deviasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen layanan administrasi kepegawaian	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelaksanaan layanan administrasi umum belum sesuai standar	1	kurangnya sosialisasi pelaksanaan	terhambatnya layanan administrasi umum			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan	Penyediaan tidak tepat waktu	1	Belum dibentuk penanggung jawab kegiatan	Penyediaan terlambat			



Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pemerintahan daerah yang disusun							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Menurunnya kinerja aparatur pemerintahan			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A)	Tidak terlaksananya pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	1	kondisi sarana dan prasarana yang sudah tidak layak, mengurangi estetika dan kenyamanan serta keselamatan pegawai dan pengunjung	Kurangnya pendataan guna pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	terdapat bangunan gedung yang kurang layak	1	Banyaknya jumlah dokumen yang tersedia guna memenuhi administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kurangnya inventarisasi dokumen yang tersedia sehingga tidak dapat memenuhi administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	tidak tercapainya inventarisasi pendataan dokumen dan pengolahan layanan administrasi kepegawaian	1	Kurang mahirnya pegawai dalam melakukan layanan administrasi kepegawaian yang sesuai dengan standar layanan	Tidak tercapainya target penyediaan dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	pelayanan administrasi umum perangkat daerah kurang memenuhi sesuai standar layanan	1	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kurang mendukungnya fasilitas pendukung administrasi umum perangkat daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Tidak kesesuaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kebutuhan	1	Kerjasama di lingkungan kantor yang kurang memenuhi target pencapaian	Keterlambatan dalam penyediaan laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Menurunnya kinerja (kerusakan) sarana dan prasarana pemerintahan	4	Kurang optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan	Kurang maksimalnya fungsi barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum,	Menurunnya tingkat pelayanan umum,	9	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum, kepegawaian dan	Pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Balai	Mengecek realisasi pelaksanaan secara	Kepala BALAITRANS	12 bulan setiap

Sasaran/Program/Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Provinsi	kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah)	kepegawaian dan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah		keuangan tersedia	Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	rutin agar dapat mengcover seluruh pelayanan sesuai target waktu	- Kepala Sub Bag TU	tahun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Menurunnya tingkat administrasi layanan keuangan	6	Banyaknya administrasi layanan keuangan yang harus disusun tidak sebanding dengan jumlah ASN	Pelayanan keuangan Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan umum yang sesuai standar layanan	9	Belum semua komponen pendukung pelayanan umum tersedia	Pelayanan umum Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal	Mengecek realisasi pelaksanaan secara rutin agar dapat mengcover seluruh pelayanan sesuai target waktu	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Menurunnya tingkat pelayanan kepegawaian yang sesuai standar layanan	6	Pelayanan kepegawaian tidak tercapai standar layanan	Pelayanan kepegawaian Balai Transportasi Jawa Tengah kurang maksimal			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Adanya permintaan tambahan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	2	Belum semua komponen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tersedia	Pelayanan menjadi kurang maksimal			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Adanya permintaan unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	9	Belum semua unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dilakukan pemeliharaan	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Melakukan pemeliharaan secara prioritas dan mengecek realisasi pelaksanaan secara rutin	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Banyak sarana dan prasarana kantor yang mengalami kerusakan	12	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak mencakup seluruh rute	Pelayanan menjadi kurang maksimal	Melakukan pemeliharaan secara prioritas dan perawatan secara berkala agar tidak terjadi kerusakan yang terlalu parah	Kepala BALAITRANS - Kepala Sub Bag TU	12 bulan setiap tahun

Sumber : Hasil Perhitungan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. 2023